



**ANALISIS KETIMPANGAN PERTUMBUHAN EKONOMI ANTAR KECAMATAN
DI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2008 - 2013**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi satu syarat untuk
menyelesaikan Program Studi Ekonomi Pembangunan (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

**Ananda Willi Wulandari
NIM 090810101127**

**ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2016**

PERSEMBAHAN

1. Puji syukur alhamdulillah dan terima kasih hamba panjatkan kepada Allah S.W.T, karena kehendak-Mu skripsi ini dapat diselesaikan;
2. Ayahanda tercinta Nahrowi dan Ibunda tercinta Murslihati, terima kasih atas dukungan serta doa yang tiada habisnya, kesabaran, keikhlasan, kasih sayang, ketulusan dan nasehat yang selalu diberikan untukku;
3. Seluruh dosen IESP yang tak pernah lelah berbagi, membimbing dan menyalurkan ilmunya;
4. Sahabat, saudara, teman seperjuangan dan suami yang selalu memberikan dukungan dan motivasi. Tidak ada kata yang bias ku ucapkan selain terima kasih atas kebersamaan yang terhampar dengan segenap lika – liku dan kasih sayang.

MOTTO

“Ilmu itu lebih baik dari harta. Ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga harta.
Ilmu itu penghukum (hakim) dan harta terhukum. Harta itu kurang apabila
dibelanjakan tapi ilmu akan bertambah bila dibelanjakan”

(Saidina Ali Bin Abi Thalib)

“Barang siapa yang pergi mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah
Sampai ia kembali”

(HR Tirmidzi)

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ananda Willi Wulandari

Nim : 090810101127

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: “Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Antar Kecamatan Di Provinsi Jawa Timur” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 24 Juni 2016

Yang menyatakan

Ananda Willi W

090810101127

SKRIPSI

**ANALISIS KETIMPANGAN PERTUMBUHAN EKONOMI ANTAR
KECAMATAN DI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2008 – 2013**

Oleh

Ananda Willi Wulandari

NIM 090810101127

Pembimbing:

Dosen Pembimbing I : Dra. Anifatul Hanim M. Si.

Dosen Pembimbing II : Dr. Rafael Purতোমো S. M. Si.

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : ANALISIS KETIMPANGAN PERTUMBUHAN
EKONOMI ANTAR KECAMATAN DI KABUPATEN
JEMBER TAHUN 2008 – 2013

Nama Mahasiswa : Ananda Willi Wulandari

NIM : 090810101127

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi pembangunan

Konsentrasi : Ekonomi Regional

Tanggal Persetujuan: 24 Juni 2016

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Anifatul Hanim M. Si

NIP. 19650730 199103 2 001

Dr. Rafael Purতোমো S. M.Si

NIP. 19581024 198803 1 001

Ketua Jurusan

Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan

Dr. Sebastiana Viphindartin, M.Kes.

NIP. 19641108 198902 2 001

PENGESAHAN

Judul Skripsi

ANALISIS KETIMPANGAN PERTUMBUHAN EKONOMI ANTAR KECAMATAN DI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2008 – 2013

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Ananda Willi Wulandari

NIM : 090810101127

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

1. Ketua : Drs. Badjuri M. E. (.....)
NIP. 19531225 198404 1 002
:
2. Sekretaris : Dr. Sebastiana Viphindartin M. Kes. (.....)
NIP. 19641108 198902 2 001
3. Anggota : Dr. Siswoyo Hari Santoso S.E., M. Si. (.....)
NIP. 19680715 199303 1 001

Mengetahui/Menyetujui,
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi
Dek
an,

Foto 4 X 6

warna

Dr. M. Fathorrazi, SE, M.Si
NIP. 196306141990021001

*ANALISIS KETIMPANGAN PERTUMBUHAN EKONOMI ANTAR KECAMATAN DI KABUPATEN
JEMBER TAHUN 2008 – 2013*

Ananda Willi Wulandari

*Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jember*

ABSTRAK

Kabupaten Jember merupakan Kabupaten yang memiliki potensi pertanian yang tinggi serta memiliki tingkat perekonomian yang cukup baik dibandingkan Kabupaten – Kabupaten di sekelilingnya sehingga menjadikan Kabupaten Jember sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di daerah tapal kuda (Banyuwangi, Jember, Bondowoso, situbondo). Dengan dijadikannya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi menjadikan Kabupaten Jember menimbulkan ketimpangan pertumbuhan ekonomi karena sumber daya di tiap daerah berbeda – beda. Dengan adanya otonomi daerah pada daerah yang minim sumber daya semakin tidak dapat berkembang, sedangkan pada daerah yang berkelimpahan sumber daya maka daerah tersebut akan semakin cepat berkembang. Dengan analisis sebagai berikut bertujuan untuk mengambil kebijakan apa yang seharusnya berguna untuk meminimalisir ketimpangan pada kecamatan yang ada di Kabupaten Jember. Dengan menggunakan alat analisis berikut ini bertujuan untuk meminimalisir ketimpangan kecamatan di Kabupaten Jember. Terdapat analisis Tipologi Klassen, analisis indeks Williamson, dan indeks kesenjangan Bonit. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pembagian wilayah yang dimana dibagi menjadi 4 bagian di dalam Tipologi Klassen. Serta melihat seberapa besar tingkat ketimpangan antar kecamatan di Kabupaten Jember dengan menggunakan alat analisis Indeks Williamson dan Indeks Kesenjangan Bonit.

Kata kunci : Ketimpangan, Pertumbuhan Ekonomi, Laju Pertumbuhan, Pendapatan Perkapita.

*ANALYSIS OF THE DIFFERENCE IN ECONOMIC GROWTH BETWEEN JEMBER TOWN IN THE
YEARS 2008 – 2013*

Ananda Willi Wulandari

Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi,

ABSTRACT

Jember is a district that has a high agricultural potential and have a level of economy quite well in comparison districts - districts around making Jember as a center of economic growth in the horseshoe (Banyuwangi, Jember, Bondowoso, Situbondo). By maketh as a center of economic growth makes the Jember raises economic growth imbalances because of the resources in each region is different - different. With regional autonomy dadnya daerah minimal resources increasingly unable to thrive, while the area's abundant resource then the area will be rapidly developed. With the following analysis aims to take what policies should be useful to minimize inequality in districts in Jember. By using the following analytical tools aimed to minimize inequality districts in Jember. There Klassen Typology analysis, Williamson index analysis, and gap index Bonit. The purpose of this study adalah to determine the zoning which is divided into four sections in the Typology Klassen. As well as see how much the level of inequality between districts in Jember by using analytical tools Williamson Index and Inequality Index Bonit.

Keywords: Inequality, Economic Growth, Growth, Income Per Capita.

RINGKASAN

Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Kecamatan di Kabupaten Jember; Ananda Willi Wulandari, 090810101127; halaman; Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Kabupaten Jember merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang mempunyai potensi pertanian cukup tinggi diantara Kabupaten lainnya. Akan tetapi ada juga Kabupaten lainnya yang mempunyai potensi pertanian lainnya. Kecamatan yang ada di Kabupaten diduga mempunyai tingkat ketimpangan yang tinggi dikarenakan adanya perbedaan tingkat PDRB per kapita serta sumber daya yang tinggi antara kecamatan yang satu dengan kecamatan yang lainnya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui klasifikasi wilayah di Kabupaten Jember dari pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang ada dimana nantinya akan dibagi menjadi 4 bagian klasifikasi yang ada yang tertera pada dalam analisis Tipologi Klassen serta untuk mengetahui besarnya kesenjangan yang ada di Kabupaten Jember untuk mengetahui digunakan Indeks Williamson dan Indeks kesenjangan Bonit di Kabupaten Jember. klasifikasi keempat adalah klasifikasi wilayah relatif tertinggal adalah kecamatan Arjasa, kecamatan Balung, kecamatan Gumukmas, kecamatan Jelbuk, kecamatan Jenggawah, kecamatan Jombang, kecamatan Kalisat, kecamatan Kencong, kecamatan Ledokombo, kecamatan Mayang, kecamatan Mumbulsari, kecamatan Pakusari, kecamatan Rambipuji, kecamatan Semboro, kecamatan Silo, kecamatan Sukorambi, kecamatan Sukowono, kecamatan Sumberjambe, kecamatan Tempurejo, kecamatan Umbulsari. Hasil analisis indeks williamson mempunyai nilai ketimpangan rata – rata sebesar 0,6600 dan hasil dari indeks kesenjangan bonit adalah :

- Kecamatan Kaliwates dan Kecamatan Sumpalsari merupakan wilayah yang mempunyai angka kesenjangan tinggi dan tertinggal di Kabupaten Jember.

- Kecamatan Silo, Rambipuji, Ledokombo merupakan tiga kecamatan di Kabupaten Jember yang mempunyai ketmpangan pendapatan antar wilayah yang paling kecil.
- Secara keseluruhan terjadi peningkatan kesenjangan antar wilayah. Artinya diduga pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jember membuat kesenjangan antar wilayah semakin meningkat.

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi yang berjudul *ANALISIS KETIMPANGAN PERTUMBUHAN EKONOMI ANTAR KECAMATAN DI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2008 – 2013* dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik itu berupa motivasi, nasehat, saran maupun kritik yang membangun. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dra. Anifatul Hanim M. Si. selaku Dosen Pembimbing I yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, kritik dan pengarahan dengan penuh keikhlasan, ketulusan dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Dr. Rafael Purtomo S. M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia membimbing penulis untuk menyusun karya akhir yang baik dengan tulus dan ikhlas;
3. Ibu selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Jember;
4. Bapak Dr. M. Fathorrazi, SE, Msi. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen beserta staf karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Jember serta Perpustakaan Ekonomi dan Perpustakaan Pusat;
6. Ibunda Murslihati dan Ayahanda Nahrowi terimakasih yang tak terhingga ananda ucapkan atas doa, dukungan, kasih sayang, kerja keras, kesabaran, dan pengorbanan selama ini
7. Seluruh keluarga besarku, terimakasih atas doa dan kasih sayang serta dukungan yang tanpa henti;

8. Untuk suami tercinta Ahmad Faiz Al Fitri yang tidak pernah letih dalam membantu, memberi semangat dan selalu ada untuk penulis dalam keadaan suka maupun duka.
9. Para Sahabat – Sahabat Leny Trisnawarawati, Susi Lestari, Nanik Safitri, Lincih Sandinata, Hasanatul Holidiyah membuat penulis semakin semangat dan ceria dalam menyelesaikan skripsi ini
10. Seluruh teman-teman di Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu terimakasih semuanya;
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu

Akhir kata tidak ada sesuatu yang sempurna di dunia ini, penulis menyadari atas kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun penulis harapkan bagi penyempurnaan tugas akhir ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan bagi penulisan karya tulis selanjutnya. Amien.

Jember, 24 Juni 2016

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBING SKRIPSI	v
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
RINGKASAN	x
PRAKATA	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Landasan Teori	6
2.1.1 Teori Pembangunan Ekonomi	6
2.1.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi	8
2.1.3 Teori Ketimpangan Ekonomi Wilayah	12
2.2 Penelitian Sebelumnya	13
2.3 Kerangka Konseptual	19

BAB 3. METODE PENELITIAN	20
3.1 Jenis Penelitian	20
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	20
3.3 Data dan Jenis Data	20
3.4 Metode Analisis	20
3.4.1 Analisis Indeks Williamson	21
3.4.2 Analisis Indeks Kesenjangan Relatif Bonit.....	22
3.4.3 Analisis Tipologi Klassen	23
3.5 Definisi Operasional	25
BAB 4. PEMBAHASAN	26
4.1 Gambaran Umum Objektif Penelitian	26
4.1.1 Kondisi dan Letak Geografis.....	26
4.1.2 Keadaan Penduduk Kabupaten Jember	28
4.1.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	29
4.2 Hasil Analisis Data	29
4.2.1 Hasil Analisis Tipologi Klassen.....	30
4.2.2 Hasil Analisis Indeks Williamson.....	32
4.2.3 Hasil Analisis Indeks Ketimpangan Bonit.....	33
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	36
5.1 Kesimpulan	36
5.2 Saran	36
DAFTAR PUSTAKA	38
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 tabel Hasil Penelitian Sebelumnya.....	16
4.1 Luas wilayah dan Jumlah penduduk.	27
4.2 Klasifikasi Tipologi Klassen.....	30
4.3 Hasil Indeks Williamson Kabupaten Jember 2008 - 2013.....	33
4.4Tabel Ketimpangan Antar Wilayah Dikabupaten Jember	34.

BAB 1.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Didalam definisi ini mengandung tiga unsur yang memiliki arti tersendiri, yaitu (1) pembangunan ekonomi sebagai salah satu proses dari yang berarti terjadinya perubahan terus menerus yang didalamnya terdapat unsur – unsur sendiri untuk investasi baru; (2) usaha untuk lebih meningkatkan pendapatan perkapita; (3) didalam meningkatkan kenaikan pendapatan per kapita harus berlangsung dalam jangka panjang (Suryana, 2000:55)

Di dalam pembangunan ekonomi selalu muncul polemik dalam menentukan strategi dasar pembangunannya, yaitu memprioritaskan pada pertumbuhan ekonomi atau pemerataan pendapatan. Beberapa pakar ekonomi berpendapat bahwa prioritas pada laju pertumbuhan ekonomi tinggi sudah tidak dapat lagi dipakai untuk mengurangi kemiskinan, sementara kemiskinan merupakan realita dalam kehidupan ekonomi di Negara yang sedang berkembang. Sebaliknya, di negara yang maju semangat untuk meningkatkan pendapatan merupakan tujuan yang paling penting dari segala kegiatan ekonomi. Tingginya ekonomi suatu daerah memang tidak menjamin pemerataan pendapatan, namun pertumbuhan ekonomi yang cepat tetap dianggap merupakan strategi unggul dalam pembangunan ekonomi.

Pembangunan ekonomi bukanlah bertujuan untuk menciptakan modernisasi dalam sesuatu masyarakat, tetapi yang lebih penting lagi adalah menciptakan kehidupan yang lebih baik kepada seluruh masyarakat tersebut. Berarti secara ideal selalu diinginkan agar usaha – usaha pembangunan akan dapat diketahui oleh seluruh masyarakat secara merata. Tujuan ini tidak akan tercapai apabila pembangunan ekonomi mengakibatkan distribusi pendapatan masyarakat menjadi semakin memburuk keadaannya. Dalam keadaan seperti ini hanya golongan

kecil saja dari keseluruhan anggota masyarakat yang menikmati hasil pembangunan (Sukirno,1996:13).

Pembangunan ekonomi dimanapun pada umumnya akan mengalami suatu dilema antara kepentingan perkembangan ekonomi dan pemerataan. Perkembangan ekonomi akan menghasilkan output nasional yang akan dinikmati oleh warga negara. Pembagian output nasional yang dihasilkan laju pertumbuhan ekonomi yang merata dapat dicapai apabila pembangunan output nasional atau hasil pembangunan ini tidak merata, hanya dinikmati oleh sebagian warga negara maka terjadi kesenjangan dalam pembagian pendapatan antar warga negara, kesenjangan ini pada gilirannya akan sangat rentan menimbulkan kecemburuan sosial yang pada akhirnya bias menimbulkan gejolak atau konflik nasional. Sedangkan pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Arsyad,1999:108).

Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlaku dari tahun ke tahun. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi daripada yang telah dicapai pada periode waktu sebelumnya (Sukirno,1996:15). Salah satu indikator penting untuk mengetahui indikator pertumbuhan ekonomi disuatu wilayah dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data PDRB dan suatu masyarakat dipandang mengalami pertambahan dalam kemakmuran masyarakatnya apabila pendapatan perkapita menurut harga konstan atau pendapatan perkapita riil terus-menerus bertambah. Laju pertumbuhan PDRB disumbang oleh sembilan (9) sektor, yaitu sektor pertanian; pertambangan dan penggalan ; industri pengolahan ; listrik, gas dan air bersih; bangunan; perdagangan, hotel dan restoran; pangangkutan dan komunikasi ; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan ; dan jasa-jasa.

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Jember dalam melaksanakan pembangunan adalah ketimpangan, baik ketimpangan yang terjadi

antar wilayah maupun ketimpangan yang terjadi didalam wilayah. Ketimpangan tersebut terlihat dari perbedaan karakteristik wilayah Jember dalam hal kepemilikan Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM), kondisi sosial dan budaya serta letak demografis wilayah tersebut. Karena karakteristik wilayah mempunyai pengaruh yang kuat pada terciptanya pola pembangunan ekonomi, maka tidak mengherankan bila pola pembangunan ekonomi wilayah di Indonesia tidak seragam (Syafrizal, 2008).

Definisi pembangunan ekonomi yang paling banyak diterima adalah suatu proses peningkatan output dalam Jangka Panjang. Yang dimaksud dengan proses adalah berlangsungnya kekuatan - kekuatan tertentu yang saling berkaitan dan mempengaruhi. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi lebih dari sekedar pertumbuhan ekonomi. Proses pembangunan menghendaki adanya pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan perubahan (*growth plus change*) dalam: pertama, perubahan struktur ekonomi; dari pertanian ke industri atau jasa. Kedua, perubahan kelembagaan, baik lewat regulasi maupun reformasi kelembagaan itu sendiri. Artinya pembangunan yang dilaksanakan tidak dilakukan hanya “secepat membalik telapak tangan”, akan tetapi dimulai dari proses yang panjang dan lama, seperti yang kita laksanakan baik melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dalam kurun waktu 1 tahun, Rencana Pembangunan Jarak Menengah (RPJM) kurun waktu 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) kurun waktu 25 tahun.

Pembangunan suatu negara dapat dilihat antaranya dari kelimpahan sumberdaya alam, kepadatan penduduk, dan pengeluaran pemerintahnya. Kelimpahan sumberdaya alam, kepadatan penduduk, dan pengeluaran pemerintah merupakan dimensi yang paling penting secara lokal, Dimana sumber daya alam adalah semua kekayaan bumi, baik biotik maupun abiotik yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan kesejahteraan manusia (Hitipieuw J:2011). Dan kepadatan penduduk sebagai pendorong konsentrasi dan mendorong terciptanya konvergensi standart hidup antar desa - desa dan kota - kota kecil dan kota - kota besar (Bank dunia, 2007:8). Sedangkan pengeluaran pemerintah merupakan instrumen pengukur dimana pemerintah menentukan seberapa besar peran sektor pemerintah dan sektor swasta. Di samping itu,

pengeluaran pemerintah dapat menjadi penentu pokok jumlah pengeluaran agregat, dan juga penentu pertumbuhan Gross National Product (GNP) riil jangka pendek. Namun untuk mendapatkan hasil yang tepat pada kelimpahan sumberdaya alam, kepadatan penduduk, dan pengeluaran pemerintah merupakan tantangan yang rumit dimana ada disparitas ekonomi di setiap wilayah dikarenakan ketidakmerataan perekonomian wilayah tersebut.

Kesenjangan atau disparitas pembangunan regional sendiri sudah cukup semarak di negara-negara berkembang. Hasil observasi menunjukkan bahwa secara umum disparitas regional di negara-negara yang kurang maju lebih lebar dari pada yang terjadi di negara-negara maju (Williamson, 1975:159). Adanya *heterogenitas* dan beragam karakteristik suatu wilayah menyebabkan kecenderungan terjadinya kesenjangan atau ketimpangan antar daerah dan antar sektor ekonomi suatu daerah. Ketidakseragaman ini akan berpengaruh terhadap kemampuan untuk tumbuh dan yang pada gilirannya akan mengakibatkan beberapa wilayah mampu tumbuh cepat sementara wilayah lainnya tumbuh lambat. Selanjutnya, kemampuan untuk tumbuh yang berbeda ini akan mengakibatkan terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah. Namun, dari sudut pandang pembangunan nasional menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah hal yang kurang disukai dan lebih sering menimbulkan berbagai kerugian daripada keuntungan atau manfaat. Sebagai suatu daerah dengan beberapa wilayah didalamnya, perbedaan karakteristik wilayah adalah konsekuensi logis yang tidak dapat dihindari Kabupaten Jember. Karakteristik wilayah mempunyai pengaruh kuat pada terciptanya pola pembangunan ekonomi, sehingga pola pembangunan ekonomi di Kabupaten Jember juga tidak seragam. Ketidakseragaman ini berpengaruh pada kemampuan untuk tumbuh, yang mengakibatkan beberapa wilayah mampu tumbuh dengan cepat sementara wilayah lainnya tumbuh lambat. Kemampuan tumbuh yang berbeda ini pada akhirnya menyebabkan terjadinya ketimpangan baik pembangunan maupun hasilnya, yakni pendapatan antar daerah.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menganalisa sejauh mana pertumbuhan ekonomi dan tingkat ketimpangan ekonomi yang terjadi dan factor apa saja yang

menjadi pendorong ketimpangan regional antar kecamatan dengan judul : “ Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Ketimpangan Antar Kecamatan Di Kabupaten Jember Tahun 2008 – 2013”.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Seberapa besarkah ketimpangan antar kecamatan di Kabupaten Jember tahun 2008 – 2013 ?
2. Bagaimanakah pola pertumbuhan dan hubungannya dengan ketimpangan antar kecamatan di Kabupaten Jember tahun 2008 – 2013 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka terdapat tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk melihat seberapa besar ketimpangan antar kecamatan di Kabupaten Jember tahun 2008 – 2013.
2. Untuk mengetahui pola pertumbuhan dan hubungannya dengan tingkat ketimpangan antar kecamatan di Kabupaten Jember tahun 2008 – 2013

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti
Sebagai tambahan pengetahuan wawasan akan pengetahuan baik teori maupun pengaplikasiannya dengan fenomena ekonomi yang sebenarnya.
2. Bagi Akademisi
Sebagai upaya untuk mengembangkan pengetahuan dibidang ekonomi terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan antar kecamatan di Kabupaten Jember .

BAB 2.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Pembangunan Ekonomi

Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi adalah dua konsep yang tidak dapat dipisahkan. Pembangunan menentukan usaha pembangunan yang berkelanjutan dan tidak memusnahkan sumberdaya asli, manakala teori dan model pertumbuhan yang dihasilkan dijadikan panduan dasar negara. Konsep pembangunan ini dikupas dalam teori pertumbuhan dan pembangunan dan coba menganalisis secara kritis dengan melihat kesesuaiannya dalam konteks daerah. Menurut Kuznet dalam Todaro (2006) pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan kapasitas produksi dalam jangka panjang dari suatu negara untuk menyediakan barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian terhadap kelembagaan dan ideologis yang diperlukan. Definisi ini mempunyai 3 (tiga) komponen: pertama, pertumbuhan suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus-menerus pada persediaan barang; kedua, teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk; ketiga, penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian dibidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan umat manusia dapat dimanfaatkan secara tepat (Jhingan, 2000).

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya - sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999).

Dalam hal prekondisi untuk meningkatkan ekonomi suatu daerah, penekanannya terdapat pada keseluruhan proses di mana masyarakat berkembang dari suatu tahap ke tahap yang lain. Pembangunan, dalam arti proses, diartikan

sebagai modernisasi yakni pergerakan dari masyarakat pertanian berbudaya tradisional ke arah ekonomi yang berfokus pada rasional, industri, dan jasa. Untuk menekankan sifat alami ‘pembangunan’ sebagai sebuah proses, Rostow menggunakan analogi dari sebuah pesawat terbang yang bergerak sepanjang lintasan terbang hingga pesawat itu dapat lepas landas dan kemudian melayang di angkasa. proses pertumbuhan ekonomi bisa dibedakan ke dalam 5 tahap : (1).Masyarakat tradisional (the traditional society), (2.)Prasyarat untuk tinggal landas (the preconditions for take-off), (3).Tinggal landas (the take-off), (4).Menuju kekedewasaan (the drive to maturity), dan (5).Masa konsumsi tinggi (the age of high mass-consumption).

Pembangunan ekonomi daerah pada teori lokasi juga sering digunakan untuk penentuan atau pengembangan kawasan industry di suatu daerah. Inti pemikiran teori ini didasarkan pada sifat rasional pengusaha atau perusahaan yang cenderung mencari keuntungan setinggi mungkin dengan biaya serendah mungkin. Oleh karena itu, pengusaha akan memilih lokasi usaha yang memaksimalkan keuntungannya dan meminimalisasikan biaya usaha atau produksinya, yakni lokasi yang dekat dengan tempat bahan baku dan pasar.

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses yang mencakup pembentukan institusi - institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan, dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru. Menurut teori ekonomi Neo Klasik, ada 2 konsep pokok dalam pembangunan ekonomi daerah yaitu keseimbangan (equilibrium) dan mobilitas faktor produksi. Artinya, sistem perekonomian akan mencapai keseimbangan alamiahnya jika modal bisa mengalir tanpa restriksi (pembatasan). Oleh karena itu, modal akan mengalir dari daerah yang berupah tinggi menuju ke daerah yang berupah rendah (Lincolin, 1997:273).

Berdasarkan Todaro (2008:16), mendefinisikan pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bersifat multidimensional, yang melibatkan kepada perubahan besar, baik terhadap perubahan struktur ekonomi, perubahan social, mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan dan

pengangguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi.

Didalam pembangunan ini terdapat sasaran yang ingin dicapai (Suryana 2000 dalam Lia Maharani, 2008:22) antara lain :

1. Dipenuhinya sandang, pangan dan perumahan serta peralatan sederhana dari berbagai kebutuhan yang secara luas dipandang perlu oleh masyarakat yang memerlukan.
2. Dibutuhkan kesempatan yang luas untuk memperoleh berbagai jasa public, pendidikan, kesehatan, pemukiman yang dilengkapi infrastruktur yang layak serta komunikasi dan lain – lain. Dijaminnya hak untuk memperoleh kesempatan kerja yang produktif yang memungkinkan adanya balas jasa yang setimpal untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
3. Terbinanya sarana dan prasarana yang memungkinkan produksi barang dan jasa atau pedagang internasional untuk memperoleh keuntungan dengan kemampuan untuk menyisihkan tabunagn untuk pembiayaan usaha kebutuhan rumah tangga.
4. Menjamin partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan proyek – proyek.

2.1.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau perkembangan jika tingkat kegiatan ekonominya meningkat atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dengan kata lain, perkembangannya baru terjadi jika jumlah barang dan jasa secara fisik yang dihasilkan perekonomian tersebut bertambah besar pada tahun-tahun berikutnya. Indikator keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah dapat ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan pendapatan masyarakat secara keseluruhan sebagai cerminan kenaikan seluruh nilai tambah (*value added*) yang tercipta di suatu wilayah.

Menurut pandangan ekonomi klasik, Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus dan John Straurt Mill, maupun ekonom neo klasik, Robert Solow

dan Trevor Swan, mengemukakan bahwa pada dasarnya ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu : (1) jumlah penduduk, (2) jumlah stock barang modal, (3) luas tanah dan kekayaan alam, dan (4) tingkat teknologi yang digunakan (Sukirno,1985:275).

Menurut Sukirno,Sadono(2000) pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan tingkat kegiatan dari tahun ke tahun. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi, harus diperbandingkan pendapatan nasional berbagai tahun yang dihitung berdasarkan harga konstan. Jadi perubahan nilai pendapatan nasional hanya semata-mata disebabkan oleh perubahan dalam tingkat kegiatan ekonomi.Pertumbuhan baru tercapai apabila jumlah barang dan jasa yang dihasilkan bertambah besar pada tahun berikutnya. Pertumbuhan ekonomi sangat diharapkan karena akan membuat masyarakat mengkonsumsi barang dan jasa dalam jumlah yang besar dan juga penyediaan barang dan jasa sosial, sehingga hidup masyarakat dapat ditingkatkan.

Teori pertumbuhan ekonomi David Ricardo dan T.R Malthus menjelaskan bahwa factor pertumbuhan penduduk yang semakin besar hingga menjadi dua kali lipat pada suatu saat akan menyebabkan jumlah tenaga kerja melimpah. Pendapat Ricardo ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Thomas Robert Malthus, menyatakan bahwa makanan (hasil produksi) akan bertambah menurut deret hitung (satu, dua, dan seterusnya). Sedangkan penduduk akan bertambah menurut deret ukur (satu, dua, empat , delapan, enam belas, dan seterusnya) sehingga pada saat perekonomian akan berada pada taraf subsisten atau kemandegan.

Model pertumbuhan neoklasik dipelopori oleh Robert M Solow pada tahun 1950 yang mengemukakan bahwa asumsi dasar yang dipakai dalam model pertumbuhan ekonomi antara lain, pengeluaran yang dihasilkan dari penggunaan dua jenis masukan yaitu modal dan tenaga kerja. Dengan banyaknya tenaga kerja yang memiliki keahlian dan pendapatan yang tinggi maka akan semakin tinggi pertumbuhannya. Begitu pula dengan modal yang dimilikinya. Dengan semakin besar modal yang dimiliki maka keinginan untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk mendapatkan keuntungan menjadi semakin besar dan nantinya juga akan mendapatkan pendapatan yang semakin besar pula.

Arsyad (1999:147-148) menyebutkan bahwa teori kutub pertumbuhan yang dipopulerkan oleh ekonom Perroux (1970) menyatakan bahwa pertumbuhan tidak muncul diberbagai daerah pada waktu yang sama. Pertumbuhan hanya terjadi di beberapa tempat yang merupakan pusat (kutub) pertumbuhan dengan intensitas yang berbeda.

Adapun factor – factor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu:

a. Faktor Sumber Daya Manusia

Sama halnya dengan proses pembangunan, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh SDM. Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam proses pembangunan, cepat lambatnya proses pembangunan tergantung kepada sejauhmana sumber daya manusianya selaku subjek pembangunan memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pembangunan.

b. Faktor Sumber Daya Alam

Sebagian besar negara berkembang bertumpu kepada sumber daya alam dalam melaksanakan proses pembangunannya. Namun demikian, sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan proses pembangunan ekonomi, apabila tidak didukung oleh kemampuan sumber daya manusianya dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia. Sumber daya alam yang dimaksud diantaranya kesuburan tanah, kekayaan mineral, tambang, kekayaan hasil hutan dan kekayaan laut.

c. Faktor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan, pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin canggih berdampak kepada aspek efisiensi, kualitas dan kuantitas serangkaian aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan dan pada akhirnya berakibat pada percepatan laju pertumbuhan perekonomian.

d. Faktor Budaya

Faktor budaya memberikan dampak tersendiri terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan, faktor ini dapat berfungsi sebagai pembangkit

atau pendorong proses pembangunan tetapi dapat juga menjadi penghambat pembangunan. Budaya yang dapat mendorong pembangunan diantaranya sikap kerja keras dan kerja cerdas, jujur, ulet dan sebagainya. Adapun budaya yang dapat menghambat proses pembangunan diantaranya sikap anarkis, egois, boros, KKN, dan sebagainya.

e. Sumber Daya Modal

Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah SDA dan meningkatkan kualitas IPTEK. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas.

Pengukuran akan kemajuan sebuah perekonomian memerlukan alat ukur yang tepat, betapa alat pengukur pertumbuhan ekonomi antara lain yaitu (Nur Pratama, 2010) :

a. Produk Domestik Bruto (PDRB)

Produk Domestik Bruto (PDB) atau di tingkat regional disebut dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu jumlah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam jangka 1 tahun dan dinyatakan dalam harga pasar. Baik PDB maupun PDRB adalah ukuran yang global sifatnya, dan keduanya ini bukan merupakan alat ukur yang sesuai, karena belum dapat mensejahterakan penduduk yang sesungguhnya, padahal kesejahteraan harus dimiliki oleh setiap Negara yang bersangkutan.

b. Produk Domestik Perkapita / Pendapatan perkapita

Produk Domestik Bruto Perkapita atau Produk Domestik Regional Bruto perkapita pada skala yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan suatu daerah yang lebih baik karena dapat mencerminkan kesejahteraan penduduk suatu negara maupun daerah yang bersangkutan dari pada nilai PDB atau PDRB saja. Produk Domestik Bruto Perkapita baik di tingkat nasional maupun di daerah adalah jumlah PDB nasional atau PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk di negara maupun di daerah yang bersangkutan, atau dapat disebut sebagai PDB atau PDRB rata-rata.

Menurut pandangan semua ekonom baik klasik maupun neoklasik mengemukakan bahwa pada dasarnya ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu, jumlah penduduk, jumlah stok barang, luas tanah dan kekayaan alam, dan tingkat teknologi yang digunakan (Sukirno, 1985:15). Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau perkembangan apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi dari pada apa yang dicapai pada masa sebelumnya.

2.1.3 Ketimpangan Ekonomi Wilayah

Ketimpangan pembangunan terjadi karena ada tiga faktor yaitu factor alami, faktor kondisi sosial dan keputusan-keputusan kebijakan. Faktor alami meliputi kondisi agroklimat, sumberdaya alam, lokasi geografis, jarak pelabuhan dengan pusat aktivitas ekonomi, lokasi geografis, wilayah potensial untuk pembangunan ekonomi. Sementara faktor sosial budaya meliputi nilai tradisi, mobilitas ekonomi, inovasi dan wirausaha. Sedangkan faktor keputusan kebijakan adalah sejumlah kebijakan yang mendukung secara langsung atau tidak terjadinya ketimpangan (Nugroho, 2004).

Di semua negara tanpa memandang ukuran dan tingkat pembangunannya, Ketimpangan pembangunan merupakan masalah regional yang tidak merata. Ketimpangan ini pada akhirnya menimbulkan permasalahan yang dalam konteks makro sangat merugikan proses pembangunan yang ingin dicapai setiap bangsa. Ketidakseimbangan pembangunan menghasilkan struktur hubungan antar wilayah yang membentuk suatu interaksi yang saling memperlemah. Wilayah/kawasan *hinterland* menjadi lemah karena pengurasan sumberdaya yang berlebihan (*backwash*) yang mengakibatkan aliran bersih dan akumulasi nilai tambah di pusat-pusat pembangunan secara masih dan berlebihan. Profesor Gunnar Myrdal dalam Jhingan (1996) berpendapat bahwa pembangunan ekonomi menghasilkan suatu proses sebab menyebab sirkuler yang membuat si kaya mendapat keuntungan semakin banyak dan mereka yang tertinggal di belakang menjadi semakin terhambat. Dampak balik (*backwash effect*) cenderung membesar dan dampak sebar (*spread effect*) cenderung mengecil. Secara kumulatif

kecenderungan ini semakin memperburuk ketimpangan internasional dan menyebabkan ketimpangan regional di antara negara-negara terbelakang.

Menurut Todaro, menggambarkan ketimpangan dengan mempertimbangkan hubungan antara tingkat pendapatan perkapita dan tingkat ketimpangan pendapatan untuk negara maju dan sedang berkembang. Dan menggambarkan ketimpangan pendapatan negara-negara tersebut dalam tiga kelompok dimana pengelompokan ini disesuaikan dengan tinggi, sedang, dan rendahnya tingkat pendapatan yang diukur menurut koefisien gini dan tingkat PDRB.

Williamson dalam Abel (2006), menyatakan bahwa ketidakmerataan antar regional berhubungan dengan proses pembangunan nasional. Berdasarkan hasil penelitiannya secara empiris terhadap sifat-sifat ketidakmerataan secara spasial di dalam suatu batas wilayah secara nasional. Wajar jika ada perbedaan yang absolut antara daerah kaya dengan daerah miskin tetap muncul bahkan bertambah. Walaupun kedua wilayah tumbuh dengan presentase yang sama. Tampaknya keterkaitan ekonomi unit-unit regional dengan negara makin kuat dibandingkan antar daerah daerah yang umum digunakan untuk mengukur ketimpangan yakni dengan mengukur ketimpangan pendapatan daerah dalam suatu nilai ketimpangan.

2.2 Tinjauan Hasil penelitian Sebelumnya

Ada beberapa penelitian yang terkait dengan analisis pertumbuhan ekonomi dan tingkat ketimpangan antar kecamatan, misalnya saja:

Penelitian Sutarno dan Mudrajad kuncoro, tentang Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan antar kecamatan di Kabupaten Banyumas 1993 – 2000. Tujuan dari penelitian ini adalah : (1). Untuk mengklasifikasi kecamatan berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita, (2). Untuk menghitung ketimpangan antar kecamatan, (3). Untuk membuktikan hipotesis kuznet tentang U terbalik apakah berlaku di Kabupaten Banyumas. Alat analisis yang dipergunakan adalah Tipology Klassen, Indeks Williamson, indeks Enthropi Theil, serta Hipotesis Kuznet. Hasil dari penelitian ini adalah (1). Berdasarkan tipologi Klassen, Kabupaten di Kabupaten Banyumas dapat diklasifikasikan berdasarkan

pertumbuhan dan pendapatan per kapita menjadi empat kelompok yaitu Kabupaten cepat maju dan cepat tumbuh, kecamatan yang maju tapi tertekan, kecamatan/daerah yang berkembang cepat dan kecamatan/daerah tertinggal, (2). Pada periode pengamatan 1993–2000 terjadi kecenderungan peningkatan ketimpangan, baik dianalisis dengan indeks Williamson maupun dengan indeks entropi Theil. Ketimpangan ini salah satunya diakibatkan konsentrasi aktivitas ekonomi secara spasial. dan (3). Hipotesis Kuznets mengenai ketimpangan yang berbentuk kurva U terbalik berlaku di Kabupaten Banyumas, ini terbukti dari hasil analisis trend dan korelasi Pearson. Hubungan antara pertumbuhan dengan indeks ketimpangan Williamson dan entropi Theil untuk kasus Kabupaten Banyumas selama periode 1993–2000 terbukti berlaku hipotesis Kuznets.

Penelitian oleh Lili Masli, tentang Analisis Faktor – factor yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah : (1). Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, (2). Melihat pola pertumbuhan ekonomi serta klasifikasi di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, (3). Melihat seberapa besar ketimpangan regional kabupaten dan antar wilayah di Provinsi Jawa Barat, (4). Untuk mengetahui factor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan ketimpangan regional antar kabupaten/ kota di provinsi Jawa Barat. Alat analisis yang dipergunakan adalah Tipologi Klassen, indeks Williamson dan Entropi Theil. Hasil dari penelitian ini adalah (1). Menurut analisis Tipologi kelas termasuk klasifikasi daerah relative tertinggal, penyebabnya adalah terjadinya aliran investasi dari daerah relatif miskin ke daerah relative kaya. (2). Dengan menggunakan PDRB tingkat ketimpangan antar kabupaten/kota di Jawa Barat pada periode penelitian antara tahun 1993 – 2006 cenderung meningkat berdasarkan indeks Williamson dan indeks Entropi Theil. Penyebabnya adalah adanya perubahan laju pertumbuhan ekonomi yang negative baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap masalah ketimpangan regional.

Penelitian oleh Putra Fajar Utama, tentang Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Ketimpangan di Kabupaten/Kota yang tergabung dalam kawasan

KEDUNGSEPUR tahun 2004 – 2008. Tujuan dari penelitian ini adalah (1). Untuk menganalisis besarnya tingkat ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi, (2). Untuk menganalisa sektor potensial kabupaten/kota di kawasan KEDUNGSEPUR. Alat analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Indeks Williamson, Location Quotient (LQ), Shift Share, dan Tipology Klassen. Hasil penelitian ini adalah (1). Berdasar analisis ketimpangan dengan menggunakan indeks williamson, diperoleh kesimpulan bahwa angka indeks williamson di KEDUNGSEPUR adalah 0,21. Artinya, ketimpangan pendapatan di KEDUNGSEPUR termasuk ketimpangan yang rendah karena indeks Williamsonnya kurang dari 0,5.

Penelitian Bery Agung Pusandika(2007), tentang Analisis Ketimpangan Pembangunan Di Era otonomi Daerah : Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Kesejahteraan Masyarakat. Dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui ketimpangan yang terjadi di Indonesia, menganalisis factor yang mempengaruhi pembangunan manusia serta korelasi antara pertumbuhan ekonomi dengan kesejahteraan masyarakat. Alat analisis yang dipergunakan adalah Indeks Williamson dan analisis panel data. Hasil penelitian ini adalah: Lemahnya hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan manusia diakibatkan oleh ketidakjelasan fungsi distribusi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan formula yang salah dalam merumuskan redistribusi fiskal atau DAU juga berperan dalam meningkatkan ketimpangan pembangunan. Bagaimana tidak, apabila pemerintah daerah masih harus menanggung biaya operasional kepegawaian sendiri. Hal ini menyebabkan anggaran belanja rutin daerah akan tersita 70 - 80 persen, dengan anggaran kepegawaian sebesar itu, maka hanya tersedia sedikit untuk anggaran yang dapat mendukung perkembangan pembangunan manusia seperti sektor pendidikan dan kesehatan.

Penelitian Sabda Imani Rubiarko (2013), tentang Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Disparitas Pendapatan Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 – 2011. Dalam penelitian ini penulis memiliki tujuan untuk melihat seberapa besar ketimpangan yang ada dan melihat hubungan antara ketimpangan dengan pertumbuhan ekonomi. Alat analisis yang digunakan oleh penulis adalah indeks

williamson dan metode regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah pengangguran terbuka secara signifikan dinyatakan menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya disparitas pendapatan di Jawa Timur. Pertumbuhan ekonomi di provinsi Jawa Timur memiliki hubungan yang negatif dengan disparitas pendapatan. Dan peningkatan pada pertumbuhan ekonomi akan menurunkan tingkat disparitas pendapatan. Sehingga terbukti secara signifikan pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi disparitas pendapatan di Jawa Timur. Pertumbuhan ekonomi, pengangguran terbuka, angka partisipasi kasar dan aglomerasi secara keseluruhan dapat mempengaruhi disparitas pendapatan

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti	Judul penelitian	Alat analisis	Hasil Penelitian
1.	Sutarno dan Mudrajad kuncoro	Ekonomi dan Ketimpangan antar kecamatan di Kabupaten Banyumas 1993 – 2000	<ul style="list-style-type: none"> • Tipology Klassen, • Indeks Williamson • indeks Entropi Theil, • Hipotesis Kuznet 	Pada periode pengamatan 1993–2000 terjadi kecenderungan peningkatan ketimpangan, baik dianalisis dengan indeks Williamson maupun dengan indeks entropi Theil. Ketimpangan ini salah satunya diakibatkan konsentrasi aktivitas ekonomi secara spasial. Hipotesis Kuznets mengenai ketimpangan yang berbentuk kurva U

				terbalik berlaku di Banyumas,. Hubungan antara pertumbuhan dengan indeks ketimpangan Williamson dan entropi Theil untuk kasus Kabupaten Banyumas selama periode 1993–200 terbukti berlaku hipotesis Kuznets.
2.	Lili Masli	Analisis Faktor – factor yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Tipologi Klassen, • Indeks Williamson • Indeks Enthropi Theil 	Dengan menggunakan PDRB tingkat ketimpangan antar kabupaten/kota di Jawa Barat pada periode penelitian antara tahun 1993 – 2006 cenderung meningkat berdasarkan indeks Williamson dan indeks Enthropi Theil. Penyebabnya adalah adanya perubahan laju pertumbuhan ekonomi yang negative baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap masalah ketimpangan regional.
3.	Putra Fajar utama	Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Ketimpangan di Kabupaten/Kota yang tergabung dalam kawasan KEDUNGSEPUR tahun 2004 – 2008	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Williamson • Location Quotient (LQ) • Shift Share, • Tipology Klassen 	Berdasar analisis ketimpangan dengan menggunakan indeks williamson, diperoleh kesimpulan bahwa angka indeks williamson di KEDUNGSEPUR adalah 0,21. Artinya, ketimpangan pendapatan di KEDUNGSEPUR termasuk ketimpangan yang rendah karena indeks Williamsonnya kurang dari 0,5.

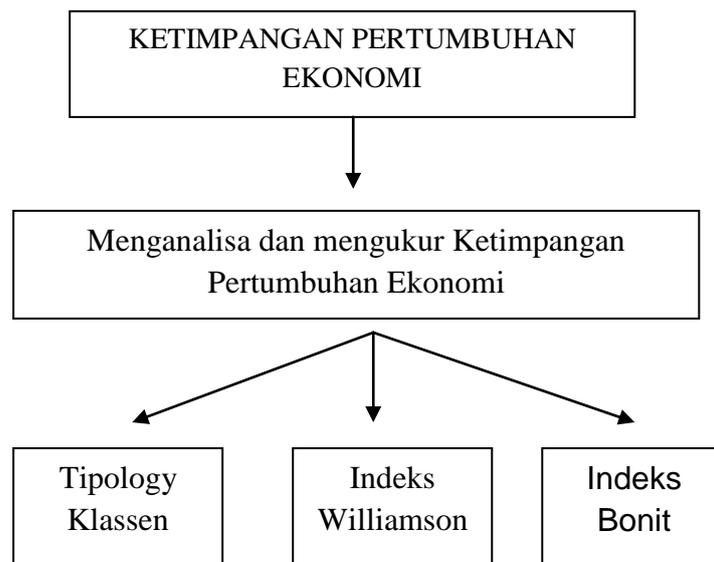
4.	Bery Agung Puspandika(2007),	Analisis Ketimpangan Pembangunan Di Era otonomi Daerah : Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Kesejahteraan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Williamson • Analisis Panel data 	Lemahnya hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan manusia diakibatkan oleh ketidakjelasan fungsi distribusi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan formula yang salah dalam merumuskan redistribusi fiskal atau DAU juga berperan dalam meningkatkan ketimpangan pembangunan. Bagaimana tidak, apabila pemerintah daerah masih harus menanggung biaya operasional kepegawaian sendiri. Hal ini menyebabkan anggaran belanja rutin daerah akan tersita 70 - 80 persen, dengan anggaran kepegawaian sebesar itu, maka hanya tersedia sedikit untuk anggaran yang dapat mendukung perkembangan pembangunan manusia seperti sektor pendidikan dan kesehatan.
5.	Sabda Imani Rubiarko	Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Disparitas Pedapatan di provinsi Jawa Timur Tahun 2008 - 2011	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks williamson • Regresi linier berganda 	pengangguran terbuka secara signifikan dinyatakan menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya disparitas pendapatan di Jawa Timur. Pertumbuhan ekonomi di provini Jawa Timur memiliki hubungan yang negatif dengan disparitas pendapatan. Dan peningkatan pada

				<p>pertumbuhan ekonomi akan menurunkan tingkat disparitas pendapatan. Sehingga terbukti secara signifikan pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi disparitas pendapatan di Jawa Timur.</p>
--	--	--	--	--

Sumber : Diolah dari berbagai sumber.

2.3 Kerangka Konseptual

Konsep pemikiran yang dijadikan dasar dalam penelitian ini dijelaskan dalam gambar sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka pemikiran

Pembangunan yang dilaksanakan diharapkan berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi. Pembangunan yang berorientasi pada pencapaian target sektoral, keberhasilannya dapat dilihat dari kontribusi sektor terhadap pembentukan PDRB dari tahun ke tahun. Pertumbuhan positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian dan apabila negatif berarti terjadinya penurunan dalam kegiatan

perekonomian. Pertumbuhan perekonomian mengakibatkan terjadinya perubahan perkembangan pembangunan suatu daerah. Kabupaten Jember diharapkan dapat tumbuh dan berkembang dengan bertambahnya tahun sehingga dapat menjadi pusat aktifitas baik social maupun ekonomi regional yang sangat potensial dan porspektif. Maka dengan bertambahnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jember maka akan semakin mengurangi tingkat ketimpangan regional maupun pendapatan di daerah – daerah terbelakang.

BAB 3.

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian tentang analisis pertumbuhan ekonomi dan tingkat ketimpangan antar kecamatan di Kabupaten Jember tahun 2008 – 2013 merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami karakteristik obyek penelitian dalam berbagai aspek secara sistematis (sekaran. 2006:160).

3.1.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan memilih daerah penelitian yang meliputi Kabupaten Jember sebagai studi kasus. Dikarenakan di Kabupaten Jember masih terdapat banyak ketimpangan – ketimpangan yang terjadi. Yang pada dasarnya masih banyak daerah – daerah terbelakang yang masih kurang merata pertumbuhan ekonominya. Sehingga dibutuhkan analisis pertumbuhan ekonomi dan tingkat ketimpangan antar kecamatan agar dapat diketahui seberapa besar ketimpangan yang terjadi dan daerah mana saja yang mengalami tingkat ketimpangan paling tinggi.

3.1.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dengan jenis data *time series* (kurun waktu). Data yang dikumpulkan berupa data produk domestic regional bruto (PDRB) tiap kecamatan dan PDRB Kabupaten Jember 2008 - 2013. Data ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jember serta data sekunder lainnya yang masih ada kaitannya dengan tujuan penelitian ini.

3.2 Metode Analisis Data

Untuk menjawab permasalahan yang telah ditetapkan, maka digunakan beberapa metode analisis data, yaitu:

3.2.1 Metode Analisis Indeks Williamson

Untuk dapat mengetahui seberapa besar tingkat ketimpangan di Kabupaten Jember maka digunakan indeks Williamson. Williamson (1965) meneliti hubungan antar Ketimpangan regional dengan tingkat pembangunan ekonomi, dengan menggunakan data ekonomi yang sudah maju dan ekonomi yang sedang berkembang, ditemukan bahwa selama tahap awal pembangunan, Ketimpangan regional menjadi lebih besar dan pembangunan terkonsentrasi di daerahdaerah tertentu. Pada tahap yang lebih matang dari pertumbuhan ekonomi tampak adanya keseimbangan antar daerah dan Ketimpangan berkurang dengan signifikan. Untuk mengetahui ketimpangan pembangunan antarkecamatan yang terjadi di Kabupaten Jember dapat dianalisis dengan menggunakan indeks ketimpangan regional (*regional in equality*) yang dinamakan indeks ketimpangan Williamson (Sjafrizal, 1997: 31) :

$$IW = \frac{\sqrt{\sum(Y-Yd)^2 \cdot nd/n}}{Yd}$$

Dimana :

nd = jumlah penduduk Kecamatan

n = jumlah penduduk Kabupaten Jember

Yd = Pendapatan Regional Perkapita Kecamatan

Y = Pendapatan Regional Perkapita Kabupaten Jember

dengan kriteria penilaian yang diperoleh antara nol dan satu ($0 < IW < 1$)

- a. Apabila nilai indeks yan diperoleh mendekati 0 maka indikasi terjadinya ketimpangan regional kecil atau pertumbuhan ekonomi merata
- b. Apabila nilai indeks yang dipeoleh mendekati 1 maka indikasi ketimpangan regional besar atau pertumbuhan ekonomi tidak merata.

Masalah ketimpangan ekonomi antar daerah tidak hanya tampak pada wajah ketimpangan perekonomian Kabupaten Jember dan Luar Kabupaten Jember

melainkan juga daerah – daerah lainnya. Berbagai program yang dikembangkan untuk menjembatani ketimpangan antar daerah selama ini ternyata belum mencapai hasil yang memadai. Alokasi penganggaran pembangunan sebagai instrumen untuk mengurangi ketimpangan ekonomi tersebut tampaknya perlu lebih diperhatikan di masa mendatang. Strategi alokasi anggaran itu harus mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menjadi alat mengurangi kesenjangan/ketimpangan regional (Majidi: 1997:1).

3.2.2 Indeks Kesenjangan Relatif Bonit

Ketimpangan wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu wilayah. Dalam penelitian ini, ketimpangan wilayah dihitung dengan menggunakan Pendekatan PDRB Per kapita relatif yang pada penelitian terdahulu telah digunakan oleh Bonet (2006) (2008) dalam mengukur kesenjangan wilayah. Adapun rumus dari pendekatan PDRB per kapita relatif sebagai berikut:

$$IQ_{i,t} = \frac{PDRB \text{ kap}_{Kec i t}}{PDRB \text{ kap}_{Kab t}} - 1$$

dimana :

- $IQ_{i,t}$ = Ketimpangan wilayah kecamatan i, pada tahun t
- $PDRB_{Kec i t}$ = PDRB perkapita Kecamatan i, pada tahun t
- $PDRBPC_{kab,t}$ = PDRB perkapita Kabupaten Jember, pada tahun t

Dalam penelitian ini tidak digunakan konsep Indeks Williamson dalam menghitung kesenjangan wilayah, tetapi menggunakan konsep PDRB per kapita relatif ini dikarenakan dalam penghitungannya diperlukan data-data dalam lingkup wilayah yang lebih kecil yang dalam hal ini adalah data dalam lingkup kecamatan. Jika indeks Bonet semakin mendekati angka 0 maka semakin kecil ketimpangan ekonomi dan semakin mendekati angka 1 atau lebih maka semakin melebar ketimpangan ekonomi. Untuk keperluan aksesibilitas data yang lebih mudah maka digunakanlah ukuran kesenjangan wilayah berdasarkan konsep PDRB per kapita relative.

3.2.3. Analisis Pertumbuhan Ekonomi Tipology Klassen

Tipologi Klassen merupakan salah satu alat analisis ekonomi regional yang dapat digunakan untuk mengetahui klasifikasi sektor perekonomian wilayah Kabupaten Jember. Analisis *Tipologi Klassen* digunakan dengan tujuan mengidentifikasi posisi sektor – sektor perekonomian wilayah Kabupaten Jember dengan memperhatikan sektor – sektor perekonomian Kabupaten Jember sebagai daerah referensi. Analisis *Tipologi Klassen* menghasilkan empat klasifikasi sektor yaitu : (1). Wilayah maju dan tumbuh pesat (Developed Sector), (2). Wilayah Maju tapi Tertekan (Stagnant Sector), (3). Wilayah yang Terbelakang (Undeveloped Sector) dan (4). Wilayah Berkembang (Developing Sector). Daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita rendah dibandingkan dengan rata – rata daerah di wilayah referensi.

Tabel 3.1. Klasifikasi Wilayah menurut *Tipologi Klassen*

Kuadran II Maju tapi tertekan (Stagnant Sector) $y_1 < y ; r_1 > r$ $S_i < S$ dan $S_{ki} > SK$	Kuadran I Maju dan tumbuh pesat (Developed Sector) $y_1 > y ; r_1 > r$ $S_i > S$ dan $S_{ki} > SK$
Kuadran VI Terbelakang (Undeveloped Sector) $y_1 < y ; r_1 < r$ $S_i < S ; S_{ki} < SK$	Kuadran III Berkembang (Developing Sector) $y_1 > y ; r_1 < r$ $S_i > S ; S_{ki} < SK$

Sumber : (Syafrizal, 2008)

Keterangan :

- y_1 : pendapatan perkapita di tiap Kecamatan
- y : pendapatan perkapita Kabupaten Jember
- r_1 : laju pertumbuhan PDRB tiap Kecamatan

- r : laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Jember
- Si : Nilai sektor i di Kecamatan
- S : PDRB Kabupaten Jember
- Ski : Kontribusi nilai sektor I terhadap PDRB Kecamatan
- SK : Kontribusi nilai sektor I terhadap PDRB Kabupaten Jember

Dengan keterangan sebagai berikut :

a. Daerah/sector tumbuh maju dan cepat (kuadran I)

Daerah/sector maju dan cepat tumbuh adalah Kabupaten yang mengalami laju pertumbuhan PDRB dan tingkat pendapatan perkapita yang lebih tinggi dari rata – rata seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Jember . Pada dasarnya pada dasarnya kecamatan tersebut merupakan kecamatan yang paling maju baik dari segi tingkat pembangunan maupun kecepatan pertumbuhan. Biasanya kecamatan ini mempunyai potensi pembangunan yang sangat pesat sehingga dapat dimanfaatkan secara baik guna kesejahteraan masyarakat setempat.

b. Daerah/sector maju tapi tertekan (kuadran II)

Daerah/sector maju tapi tertekan adalah Kabupaten yang relative maju tetapi dalam beberapa tahun terakhir laju pertumbuhannya menurun akibat tertekannya kegiatan utama kecamatan tersebut. Oleh karena itu, walaupun kecamatan ini merupakan yang telah maju akan tetapi di masa yang akan datang diperkirakan pertumbuhannya tidak akan begitu cepat, walaupun potensi pembangunan yang dimiliki sangat besar.

c. Daerah/sector berkembang (kuadran III)

Daerah/sector berkembang pada dasarnya adalah Kabupaten yang memiliki potensi pengembangan yang sangat besar namun masih belum diolah secara baik. Oleh karena itu, walaupun tingkat

pertumbuhannya tinggi, namun tingkat pendapatan per kapitanya tidak seimbang. Di masa mendatang, kecamatan ini diperkirakan akan mampu berkembang dengan pesat untuk mengejar ketinggalannya dari kecamatan lainnya.

d. Daerah/sector terbelakang (kuadran IV)

Daerah/sector terbelakang dimana Kabupaten tersebut memiliki pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan per kapitanya berada dibawah rata – rata. Hal ini mencerminkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonominya relative rendah. Akan tetapi hal ini bukan berarti kecamatan tersebut tidak dapat berkembang di masa yang akan datang. Kabupaten yang terbelakang dapat mengejar ketertinggalan daerahnya dengan melalui pengembangan sarana dan prasarana, tingkat pendidikan dan pengetahuan serta sosiali masyarakatnya.

3.3 Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya pemahaman yang tidak tepat dan luasnya permasalahan, maka terdapat pembatasan- pembatasan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi

Proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Sedangkan untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi daerah dengan menggunakan data PDRB.

2. Disparitas Ekonomi Wilayah

Menggunakan parameter indeks Williamson, dan disimpulkan Jika indeks Williamson semakin mendekati angka 0 maka semakin kecil ketimpangan pembangunan ekonomi dan jika indeks Wlliamson semakin mendekati angka 1 maka semakin melebar ketimpangan pembangunan ekonomi. Dalam menghitung indeks Williamson indikator yang digunakan adalah PDRB perkapita dalam kaitannya dengan jumlah penduduk.

BAB IV.

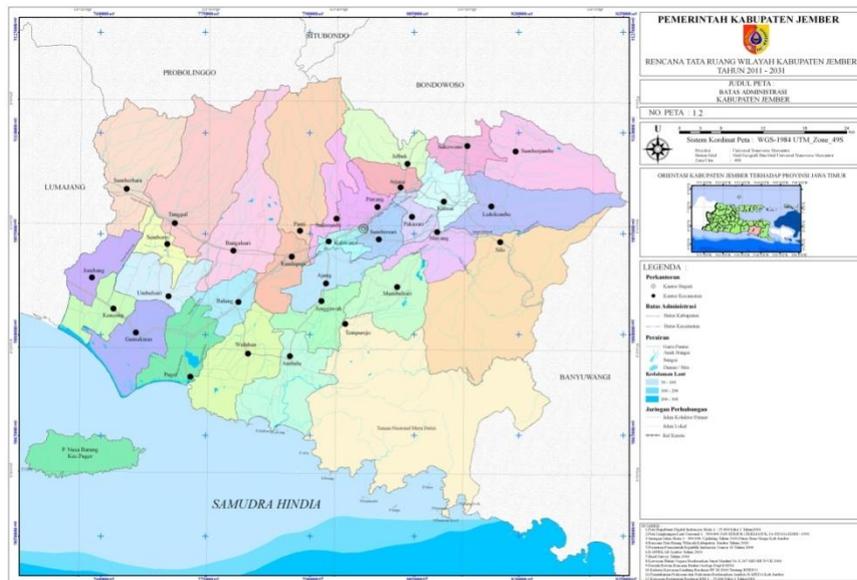
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian

4.1.1. Kondisi dan Letak Geografis

Kabupaten Jember secara astronomis terletak pada posisi $6^{\circ}27'29''$ s/d $7^{\circ}14'35''$ Bujur Timur dan $7^{\circ}59'6''$ s/d $8^{\circ}33'56''$ Lintang Selatan dengan luas wilayah seluas $3.293,34 \text{ Km}^2$ dan memiliki ± 76 pulau-pulau kecil dengan pulau terbesar adalah Pulau Nusa Barong. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Jember memiliki batas Sebelah Utara : Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo; Sebelah Selatan : Samudra Indonesia; Sebelah Timur : Kabupaten Banyuwangi; Sebelah Barat : Kabupaten Lumajang.

Gambar 2. Peta Kabupaten Jember



Penggunaan lahan di Kabupaten Jember didominasi oleh fungsi kegiatan budidaya, dimana lahan yang dibudidayakan untuk pertanian adalah seluas 46,41 % dari luas wilayah, sedangkan sisanya digunakan untuk permukiman seluas 9,93 %, hutan seluas 21,17 % dan lain-lain seluas 22,49 %. Kabupaten Jember berada

pada ketinggian 0 – 3.330 meter di atas permukaan laut. Daerah dengan ketinggian 100 – 500 meter di atas permukaan air laut merupakan kawasan terluas, yaitu 1.240,77 km² atau 37,68 % dari luas wilayah Kabupaten Jember sedangkan kawasan tersempit adalah daerah dengan ketinggian lebih dari 2.000 meter di atas permukaan laut dengan luas 31,34 km² atau 0,95 % dari luas wilayah Kabupaten Jember.

Kabupaten Jember memiliki karakter topografi dataran ngarai yang subur pada bagian Tengah dan Selatan serta dikelilingi oleh pegunungan yang memanjang pada batas Barat dan Timur. Di wilayah Barat daya memiliki dataran dengan ketinggian 0 – 25 meter di atas permukaan laut, sedangkan di wilayah Timur Laut yang berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan wilayah Tenggara yang berbatasan dengan Kabupaten Banyuwangi memiliki ketinggian di atas 1.000 meter di atas permukaan air laut.

Secara administrasi Kabupaten Jember terbagi menjadi 31 Kecamatan, 22 Kelurahan dan 246 Desa. Pembagian wilayah administrasi Kabupaten Jember berikut luasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1. Luas Wilayah dan Jumlah Kelurahan/Desa di Kabupaten Jember

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Luas Wilayah	
			(km ²)	(%) thd Total
1.	Kencong	5	65,92	2,001615
2.	Gumukmas	8	82,98	2,519631
3.	Puger	12	148,99	4,523979
4.	Wuluh	7	137,18	4,165376
5.	Ambulu	7	104,56	3,174892
6.	Tempurejo	8	524,46	15,92487
7.	Silo	9	309,98	9,412329
8.	Mayang	7	63,78	1,936636
9.	Mumbulsari	7	95,23	2,891593
10.	Jenggawah	8	51,02	1,549187
11.	Ajung	7	56,61	1,718924
12.	Rambipuji	8	52,80	1,603236
13.	Balung	8	47,12	1,430766
14.	Umbulsari	10	70,52	2,141291
15.	Semoro	6	45,43	1,379451
16.	Jombang	6	54,30	1,648782
17.	Sumberbaru	10	166,37	5,05171

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Luas Wilayah	
			(km ²)	(%) thd Total
18.	Tanggul	8	198,99	6,042194
19.	Bangsalsari	11	175,28	5,322256
20.	Panti	7	160,71	4,879848
21.	Sukorambi	5	60,63	1,840988
22.	Arjasa	6	43,75	1,328439
23.	Pakusari	7	29,11	0,883905
24.	Kalisat	12	53,48	1,623883
25.	Ledokombo	10	146,92	4,461125
26.	Sumberjambe	9	138,24	4,197562
27.	Sukowono	12	44,04	1,337244
28.	Jelbuk	6	65,06	1,975502
29.	Kaliwates	7	24,94	0,757286
30.	Sumbersari	7	37,05	1,124998
31.	Patrang	8	36,99	1,123176
		248	3.293,34	100

Sumber : BPS Jember

4.1.2 Kondisi Penduduk di Kabupaten Jember

Jumlah penduduk Kabupaten Jember berdasarkan hasil sensus penduduk Tahun 2010 tercatat sebanyak 2.329.929 jiwa, terdiri dari 1.143.766 jiwa penduduk laki-laki dan 1.186.163 jiwa penduduk perempuan, dengan sex ratio di Kabupaten Jember sebesar 96,43. Dari tahun ke tahun jumlah penduduk Kabupaten Jember relatif terus bertambah. Jika dibandingkan dengan Tahun 2009, penduduk Kabupaten Jember bertambah 14.227 jiwa atau sebesar 0,61 %. Jika dibandingkan dengan hasil sensus penduduk Tahun 2000, maka selama 10 (sepuluh) tahun terjadi pertambahan penduduk sebanyak 142.272 jiwa atau pertumbuhan rata-rata penduduk sebesar 0,63 % per tahun. Persebaran penduduk Kabupaten Jember dapat dikatakan tersebar secara merata untuk masing – masing kecamatan. Kecamatan dengan jumlah penduduk paling banyak adalah kecamatan Sumbersari dengan 126.279 jiwa, diurutan kedua kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling banyak adalah kecamatan Wuluhan dengan 114.695 jiwa. Jumlah penduduk di Kabupaten Jember yang paling sedikit adalah kecamatan Jelbuk, yang dimana jumlah penduduknya hanya 31.962 jiwa. Kepadatan penduduk rata – rata di Kabupaten Jember sebesar 708,32 jiwa/km². Kepadatan penduduk yang paling tinggi adalah di kecamatan Kaliwates sebesar

4.485,20 jiwa/km². Sedangkan kecamatan Tempurejo memiliki kepadatan penduduk paling rendah sebesar 134,73 jiwa/km².

4.1.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan pendapatan perkapita suatu wilayah yang ditunjukkan dengan tingkat investasi serta besarnya perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut. salah satu tolak ukur untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi tersebut ialah dengan mengetahui pertumbuhan PRDB wilayah atau provinsi tersebut.

Peningkatan PRDB suatu wilayah tentunya akan memberikan kesan positif bagi wilayah tersebut dalam menarik investor guna menanamkan saham di daerah tersebut yang berdampak peningkatan lapangan kerja. Apabila PRDB mengalami peningkatan yang positif dari tahun ke tahun tentunya akan memberikan keuntungan yang positif pula bagi penerima modal dalam berinvestasi di berbagai saham yang ada di wilayah tersebut.

Struktur PDRB selama tahun 2008 – 2013 menunjukkan bahwa sektor yang mempunyai kontribusi terbesar terhadap PDRB adalah sektor pertanian, sektor industri pengolahan dan jasa – jasa. Tingginya kontribusi pada tiap sektor tersebut tidak menjamin bahwa sektor tersebut merupakan sektor prioritas. Sektor prioritas harus memiliki struktur, perilaku dan kinerja yang lebih tinggi dibandingkan sektor – sektor lainnya.

4.2 Hasil Analisis Data

4.2.1 Hasil Analisis Tipologi Klassen

Analisis ini diperoleh empat klasifikasi yaitu wilayah maju dan wilayah tumbuh cepat, wilayah yang sedang tumbuh, wilayah maju tetapi tertekan dan wilayah yang relatif tertinggal dengan melalui pendekatan wilayah dan pendekatan sektor. Kabupaten/ Kota yang masing-masing mempunyai karakteristik pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang berbeda-beda diklasifikasikan dengan tipologi Klassen pendekatan wilayah. Dalam mengetahui

klasifikasi daerah maju dan

berkembang didasarkan kepada dua indikator utama yaitu pertumbuhan ekonomi dan pendapatan atau PDRB per kapita. Dengan menentukan rata-rata PDRB per kapita sebagai sumbu horizontal, sedangkan daerah per Kabupaten dibagi menjadi empat golongan yaitu Kabupaten yang cepat maju dan cepat tumbuh (high growth and high income), Kabupaten maju tapi tertekan (high income but low growth), Kabupaten yang berkembang cepat (high growth but low income) dan Kabupaten yang relatif tertinggal (low growth and low income). (Sjafrizal, 1997 ; Mudrajat Kuncoro dan Aswandi,2002). Berdasarkan hasil analisis tipologi Klassen dapat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel.4.2 Klasifikasi Tipologi Klasen Di Kabupaten Jember Tahun 2012

Maju & Tumbuh Cepat	Sedang Tumbuh
<ul style="list-style-type: none"> • Ajung; • Kaliwates; • Patrang; • Puger • Sumbersari 	<ul style="list-style-type: none"> • Ambulu; • Bangsalsari; • Wuluhan
Maju Tetapi Tertekan	Relatif Tertinggal
<ul style="list-style-type: none"> • Sumberbaru • Tanggul 	<ul style="list-style-type: none"> • Arjasa; • Balung; • Gumukmas; • Jelbuk; • Jenggawah; • Jombang; • Kalisat; • Kencong; • Ledokombo; • Mayang; • Mumbulsari; • Pakusari; • Rambipuji; • Semboro; • Silo; • Sukorambi; • Sukowono; • Sumberjambe; • Tempurejo

Sumber : Data Lampiran 2016

Berdasarkan table di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Ada lima kecamatan di Kabupaten Jember yang tergolong daerah maju dan tumbuh dengan cepat yakni kecamatan Ajung dengan jumlah penduduk sebanyak 75.778 jiwa, serta jumlah produk domestik regional bruto sebesar 706.894.703 yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Kecamatan Kaliwates juga mengalami banyak kenaikan dari tahun ke tahun yang mana pada tahun 2012 jumlah penduduk mencapai 112.476 jiwa dan mengalami kenaikan pada tahun 2013 sebesar 113.736 jiwa. Hal tersebut bisa memicu naiknya produk domestik regional bruto pada tahun 2013 sebesar 1.556.306.957 (milyar rupiah). Kecamatan Patrang juga mengalami banyak kenaikan pada jumlah penduduk dan PDRB dari tahun – tahun sebelumnya. Pada tahun 2013, jumlah penduduk di kecamatan Patrang mencapai 96.201 jiwa dan jumlah PDRB untuk kecamatan Patrang pada tahun 2013 sebesar 1.063.270.882 (milyar rupiah), pada kecamatan Puger jumlah penduduk pada tahun 2013 sebesar 114.506 jiwa dan jumlah PDRB tahun 2013 sebesar 896.658.686 (ratus juta rupiah) dan pada kecamatan Sumpalsari merupakan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk dan nilai PDRB paling tinggi dibandingkan kecamatan lainnya. Hal ini dilihat dari jumlah penduduknya pada tahun 2013 sebesar 126.279 jiwa dan jumlah PDRB pada tahun tersebut sebesar 1.539.812.218 (milyar rupiah). Dengan nilai sebanyak itu menjadikan kecamatan Sumpalsari sebagai kecamatan yang paling tinggi posisinya dibandingkan kecamatan – kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Jember.
- b) Tiga kecamatan termasuk kategori sedang tumbuh yakni kecamatan Ambulu yang memiliki jumlah penduduk sebesar 99.740 jiwa dan jumlah PDRB sebesar 814.27.901 (ratus ribu rupiah); Kecamatan Bangsalsari juga mengalami kenaikan kenaikan dari tahun ke tahun yang dimana jumlah penduduknya pada tahun 2013 sebesar 719.487.221 (ratus ribu

rupiah) dan Kecamatan Wuluhan tidak seperti kecamatan Ambulu dan kecamatan Wuluhan, hal ini dikarenakan pada kecamatan Wuluhan mengalami penurunan jumlah penduduk pada tahun 2013. Yang awalnya pada tahun 2012 jumlah penduduk sebesar 70.475 jiwa mengalami penurunan menjadi 58.497 jiwa pada tahun 2013. Namun pada nilai PDRB tahun 2013 mengalami kenaikan dibanding tahun 2012, yang dimana pada tahun 2012 jumlah PDRB kecamatan wuluhan sebesar 728.537.850 (ratus ribu rupiah) mengalami kenaikan menjadi 774.706.232 (ratus ribu rupiah).

- c) Dua Kecamatan yang tergolong kawasan maju tetapi tertekan yakni kecamatan Sumberbaru dan kecamatan Tanggul.
- d) Mayoritas kecamatan di Kabupaten Jember tergolong relative tertinggal. Kecamatan – kecamatan yang mengalami penurunan jumlah penduduk dan jumlah PDRB adalah kecamatan Arjasa, kecamatan Balung, kecamatan Gumukmas, kecamatan Jelbuk, kecamatan Jenggawah, kecamatan Jombang, kecamatan Kalisat, kecamatan Kencong, kecamatan Ledokombo, kecamatan Mayang, kecamatan Mumbulsari, kecamatan Pakusari, kecamatan Rambipuji, kecamatan Semboro, kecamatan Silo, kecamatan Sukorambi, kecamatan Sukowono, kecamatan Sumberjambe, kecamatan Tempurejo, kecamatan Umbulsari

4.2.2 Hasil Analisis Indeks Williamson

Nilai ketimpangan PDRB per kapita antar kecamatan memberikan suatu gambaran tentang kondisi, keadaan dan perkembangan pembangunan di suatu daerah. Untuk melihat gambaran yang lebih jelasnya lagi tentang kondisi suatu daerah di Kabupaten Jember, akan dibahas pemerataan ketimpangan PRBD per kapita antar kecamatan yang dianalisis dengan menggunakan indeks ketimpangan Williamson. Dalam angka indeks Williamson semakin kecil atau mendekati nol menunjukkan bahwa ketimpangan yang semakin kecil pula, bisa dikatakan bahwa daerah tersebut mengalami pemerataan, baik dari segi ekonomi, penduduk maupun infrastrukturnya. dan bila angka indeks Williamson semakin

besar atau jauh dari angka nol maka ketimpangan semakin melebar.

Ketimpangan pendapatan secara umum dapat dilihat dari perbedaan faktor alokasi dana pembangunan, konsentrasi kegiatan ekonomi, kondisi demografis dan kebijakan pemerintah (Sjafrizal, 2012: 112). Selain itu, Estudilo 1997 (dalam Mildino, 2011) menyatakan bahwa di Filipina faktor yang menyebabkan ketidakmerataan pendapatan adalah meningkatnya jumlah anggota rumah tangga terdidik dan ketidakmerataan tingkat upah.

Table 4.3 hasil indeks Williamson Kabupaten Jember periode 2008 – 2013

Tahun	Indeks Williamson
2009	0,6935
2010	0,7037
2011	0,6600
2012	0,6765
2013	0,6821

Sumber : Hasil perhitungan Analisis Indeks Williamson tahun 2008 - 2013

Pada tabel 4.3 menunjukkan hasil Indeks Williamson di Kabupaten Jember mengalami kenaikan dan penurunan. Selama tahun 2009 – 2010 terjadi kenaikan yang sangat signifikan. Pada tahun tersebut indeks williamson menunjukkan angka 0,6935 dan mengalami kenaikan 0,7037 pada tahun 2010. Tinggi rendahnya nilai indeks williamson mengandung arti bahwa ketimpangan rata – rata PDRB perkapita antar kecamatan di Kabupaten Jember dengan kecamatan lainnya menunjukkan bahwa secara rata – rata tingkat PDRB perkapita antar kecamatan di Kabupaten Jember tidak merata.

4.2.3 Hasil Analisis Indeks Bonit

Dalam penelitian ini, ketimpangan wilayah dihitung dengan menggunakan Pendekatan PDRB Per kapita relatif yang pada penelitian terdahulu telah digunakan oleh Bonet (2006) (2008) dalam mengukur kesenjangan wilayah. dalam penghitungannya diperlukan data-data dalam lingkup wilayah yang lebih kecil yang dalam hal ini adalah data dalam lingkup kecamatan. Jika indeks Bonet semakin mendekati angka 0 maka semakin kecil ketimpangan ekonomi dan semakin mendekati angka 1 atau lebih maka semakin melebar ketimpangan

ekonomi. Untuk keperluan aksesibilitas data yang lebih mudah maka digunakanlah ukuran kesenjangan wilayah berdasarkan konsep PDRB per kapita relative.

Berdasarkan data yang diambil dari lampiran perhitungan indeks ketimpangan relative Bonit dapat disajikan seperti dalam tabel berikut :

Tabel 4.4 Ketimpangan Antar Wilayah Di Kabupaten Jember

INDEKS KETIMPANGAN PENDAPATAN BONIT					
Kecamatan	2009	2010	2011	2012	2013
1 Ajung	0,32529	0,30838	0,36707	0,40501	0,48882
2 Ambulu	0,45589	0,48621	0,35522	0,22647	0,21427
3 Arjasa	0,42973	0,41604	0,55708	0,56669	0,57225
4 Balung	0,21020	0,22662	0,19759	0,21502	0,21830
5 Bangsarsari	0,09127	0,11265	0,03668	0,00523	0,01005
6 Gumuk mas	0,16464	0,14992	0,21278	0,24667	0,25638
7 Jelbuk	0,58527	0,59063	0,98418	0,98472	0,98472
8 Jenggawah	0,30266	0,30050	0,25365	0,32358	0,35834
9 Jombang	0,35358	0,35518	0,49286	0,47360	0,50542
10 Kalisat	0,09061	0,12402	0,32501	0,34003	0,35073
11 Kaliwates	1,13504	1,20827	1,14835	1,15604	1,18387
12 Kencong	0,09711	0,06514	0,16520	0,18535	0,19046
13 Ledokombo	0,08613	0,09123	0,40923	0,42848	0,43994
14 Mayang	0,49265	0,49955	0,52202	0,59115	0,59111
15 Mumbulsari	0,48429	0,48040	0,53572	0,53848	0,55069
16 Pakusari	0,39762	0,39880	0,58267	0,57520	0,59293
17 Panti	0,15387	0,16676	0,24115	0,23354	0,27150
18 Patrang	0,10561	0,04747	0,89247	0,76878	0,76398
19 Puger	0,35540	0,22454	0,26740	0,26007	0,24977
20 Rambipuji	0,07518	0,05156	0,04789	0,06226	0,08554
21 Semboro	0,18695	0,22664	0,38248	0,39174	0,38316
22 Silo	0,01589	0,01367	0,15883	0,15254	0,17083
23 Sukorambi	0,59379	0,60957	0,55552	0,55284	0,56795
24 Sukowono	0,23220	0,19439	0,32324	0,32468	0,33966
25 Sumberbaru	0,02857	0,00284	0,01340	0,05905	0,00419
26 Sumber jambe	0,38478	0,38055	0,46904	0,48515	0,50184
27 Summersari	1,12607	1,18012	0,93854	1,06068	1,01436
28 Tanggul	0,45757	0,45469	0,00492	0,08605	0,05147
29 Tempurejo	0,61112	0,62432	0,38717	0,38983	0,40318
30 Umbulsari	0,14316	0,17017	0,23761	0,24313	0,27505
31 Wuluhan	0,24185	0,11962	0,09370	0,75779	1,11365

Sumber : Lampiran 2016

Beberapa kesimpulan data disampaikan dari data kesenjangan antar wilayah di atas :

- a) Kecamatan Kaliwates dan Kecamatan Sumbersari merupakan wilayah yang mempunyai angka kesenjangan tinggi dan tertinggi di Kabupaten Jember.
- b) Kecamatan Silo, Rambipuji, Ledokaombo merupakan tiga kecamatan di Kabupaten Jember yang mempunyai ketmpangan pendapatan antar wilayah yang paling kecil.
- c) Secara keseluruhan terjadi peningkatan kesenjangan antar wilayah. Artinya diduga pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jember membuat kesenjangan antar wilayah semakin meningkat.

BAB IV.

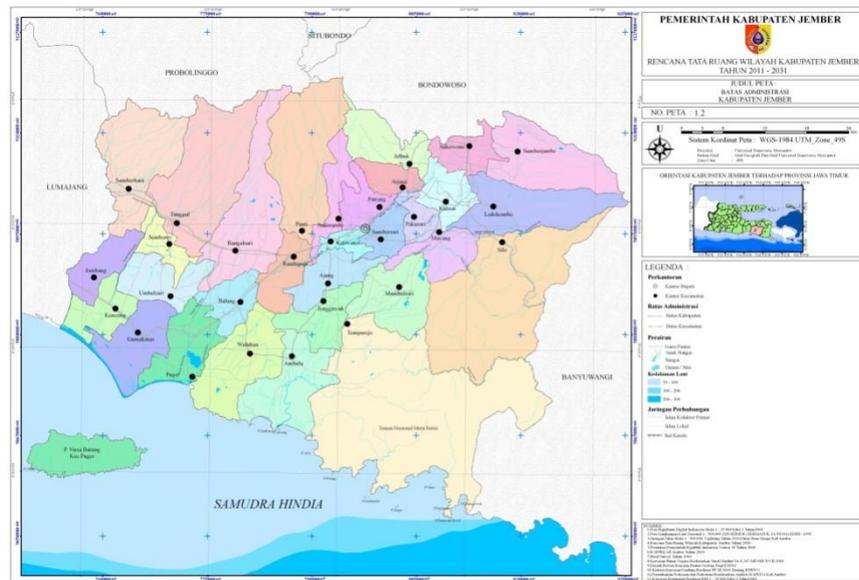
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian

4.1.1. Kondisi dan Letak Geografis

Kabupaten Jember secara astronomis terletak pada posisi $6^{\circ}27'29''$ s/d $7^{\circ}14'35''$ Bujur Timur dan $7^{\circ}59'6''$ s/d $8^{\circ}33'56''$ Lintang Selatan dengan luas wilayah seluas $3.293,34 \text{ Km}^2$ dan memiliki ± 76 pulau-pulau kecil dengan pulau terbesar adalah Pulau Nusa Barong. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Jember memiliki batas Sebelah Utara : Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo; Sebelah Selatan : Samudra Indonesia; Sebelah Timur : Kabupaten Banyuwangi; Sebelah Barat : Kabupaten Lumajang.

Gambar 2. Peta Kabupaten Jember



Penggunaan lahan di Kabupaten Jember didominasi oleh fungsi kegiatan budidaya, dimana lahan yang dibudidayakan untuk pertanian adalah seluas 46,41 % dari luas wilayah, sedangkan sisanya digunakan untuk permukiman seluas 9,93 %, hutan seluas 21,17 % dan lain-lain seluas 22,49 %. Kabupaten Jember berada

pada ketinggian 0 – 3.330 meter di atas permukaan laut. Daerah dengan ketinggian 100 – 500 meter di atas permukaan air laut merupakan kawasan terluas, yaitu 1.240,77 km² atau 37,68 % dari luas wilayah Kabupaten Jember sedangkan kawasan tersempit adalah daerah dengan ketinggian lebih dari 2.000 meter di atas permukaan laut dengan luas 31,34 km² atau 0,95 % dari luas wilayah Kabupaten Jember.

Kabupaten Jember memiliki karakter topografi dataran ngarai yang subur pada bagian Tengah dan Selatan serta dikelilingi oleh pegunungan yang memanjang pada batas Barat dan Timur. Di wilayah Barat daya memiliki dataran dengan ketinggian 0 – 25 meter di atas permukaan laut, sedangkan di wilayah Timur Laut yang berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan wilayah Tenggara yang berbatasan dengan Kabupaten Banyuwangi memiliki ketinggian di atas 1.000 meter di atas permukaan air laut.

Secara administrasi Kabupaten Jember terbagi menjadi 31 Kecamatan, 22 Kelurahan dan 246 Desa. Pembagian wilayah administrasi Kabupaten Jember berikut luasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1. Luas Wilayah dan Jumlah Kelurahan/Desa di Kabupaten Jember

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Luas Wilayah	
			(km ²)	(%) thd Total
1.	Kencong	5	65,92	2,001615
2.	Gumukmas	8	82,98	2,519631
3.	Puger	12	148,99	4,523979
4.	Wuluh	7	137,18	4,165376
5.	Ambulu	7	104,56	3,174892
6.	Tempurejo	8	524,46	15,92487
7.	Silo	9	309,98	9,412329
8.	Mayang	7	63,78	1,936636
9.	Mumbulsari	7	95,23	2,891593
10.	Jenggawah	8	51,02	1,549187
11.	Ajung	7	56,61	1,718924
12.	Rambipuji	8	52,80	1,603236
13.	Balung	8	47,12	1,430766
14.	Umbulsari	10	70,52	2,141291
15.	Semoro	6	45,43	1,379451
16.	Jombang	6	54,30	1,648782
17.	Sumberbaru	10	166,37	5,05171

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Luas Wilayah	
			(km ²)	(%) thd Total
18.	Tanggul	8	198,99	6,042194
19.	Bangsalsari	11	175,28	5,322256
20.	Panti	7	160,71	4,879848
21.	Sukorambi	5	60,63	1,840988
22.	Arjasa	6	43,75	1,328439
23.	Pakusari	7	29,11	0,883905
24.	Kalisat	12	53,48	1,623883
25.	Ledokombo	10	146,92	4,461125
26.	Sumberjambe	9	138,24	4,197562
27.	Sukowono	12	44,04	1,337244
28.	Jelbuk	6	65,06	1,975502
29.	Kaliwates	7	24,94	0,757286
30.	Sumbersari	7	37,05	1,124998
31.	Patrang	8	36,99	1,123176
		248	3.293,34	100

Sumber : BPS Jember

4.2.3 Kondisi Penduduk di Kabupaten Jember

Jumlah penduduk Kabupaten Jember berdasarkan hasil sensus penduduk Tahun 2010 tercatat sebanyak 2.329.929 jiwa, terdiri dari 1.143.766 jiwa penduduk laki-laki dan 1.186.163 jiwa penduduk perempuan, dengan sex ratio di Kabupaten Jember sebesar 96,43. Dari tahun ke tahun jumlah penduduk Kabupaten Jember relatif terus bertambah. Jika dibandingkan dengan Tahun 2009, penduduk Kabupaten Jember bertambah 14.227 jiwa atau sebesar 0,61 %. Jika dibandingkan dengan hasil sensus penduduk Tahun 2000, maka selama 10 (sepuluh) tahun terjadi pertambahan penduduk sebanyak 142.272 jiwa atau pertumbuhan rata-rata penduduk sebesar 0,63 % per tahun. Persebaran penduduk Kabupaten Jember dapat dikatakan tersebar secara merata untuk masing – masing kecamatan. Kecamatan dengan jumlah penduduk paling banyak adalah kecamatan Sumbersri dengan 126.279 jiwa, diurutan kedua kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling banyak adalah kecamatan Wuluhan dengan 114.695 jiwa. Jumlah penduduk di Kabupaten Jember yang paling sedikit adalah kecamatan Jelbuk, yang dimana jumlah penduduknya hanya 31.962 jiwa. Kepadatan penduduk rata – rata di Kabupaten Jember sebesar 708,32 jiwa/km². Kepadatan penduduk yang paling tinggi adalah di kecamatan Kaliwates sebesar

4.485,20 jiwa/km². Sedangkan kecamatan Tempurejo memiliki kepadatan penduduk paling rendah sebesar 134,73 jiwa/km².

4.1.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan pendapatan perkapita suatu wilayah yang ditunjukkan dengan tingkat investasi serta besarnya perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut. salah satu tolak ukur untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi tersebut ialah dengan mengetahui pertumbuhan PRDB wilayah atau provinsi tersebut.

Peningkatan PRDB suatu wilayah tentunya akan memberikan kesan positif bagi wilayah tersebut dalam menarik investor guna menanamkan saham di daerah tersebut yang berdampak peningkatan lapangan kerja. Apabila PRDB mengalami peningkatan yang positif dari tahun ke tahun tentunya akan memberikan keuntungan yang positif pula bagi penerima modal dalam berinvestasi di berbagai saham yang ada di wilayah tersebut.

Struktur PDRB selama tahun 2008 – 2013 menunjukkan bahwa sektor yang mempunyai kontribusi terbesar terhadap PDRB adalah sektor pertanian, sektor industri pengolahan dan jasa – jasa. Tingginya kontribusi pada tiap sektor tersebut tidak menjamin bahwa sektor tersebut merupakan sektor prioritas. Sektor prioritas harus memiliki struktur, perilaku dan kinerja yang lebih tinggi dibandingkan sektor – sektor lainnya.

4.3 Hasil Analisis Data

4.2.1 Hasil Analisis Tipologi Klassen

Analisis ini diperoleh empat klasifikasi yaitu wilayah maju dan wilayah tumbuh cepat, wilayah yang sedang tumbuh, wilayah maju tetapi tertekan dan wilayah yang relatif tertinggal dengan melalui pendekatan wilayah dan pendekatan sektor. Kabupaten/ Kota yang masing-masing mempunyai karakteristik pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang berbeda-beda diklasifikasikan dengan tipologi Klassen pendekatan wilayah. Dalam mengetahui

klasifikasi daerah maju dan

berkembang didasarkan kepada dua indikator utama yaitu pertumbuhan ekonomi dan pendapatan atau PDRB per kapita. Dengan menentukan rata-rata PDRB per kapita sebagai sumbu horizontal, sedangkan daerah per Kabupaten dibagi menjadi empat golongan yaitu Kabupaten yang cepat maju dan cepat tumbuh (high growth and high income), Kabupaten maju tapi tertekan (high income but low growth), Kabupaten yang berkembang cepat (high growth but low income) dan Kabupaten yang relatif tertinggal (low growth and low income). (Sjafrizal, 1997 ; Mudrajat Kuncoro dan Aswandi,2002). Berdasarkan hasil analisis tipologi Klassen dapat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel.4.2 Klasifikasi Tipologi Klasen Di Kabupaten Jember Tahun 2012

Maju & Tumbuh Cepat	Sedang Tumbuh
<ul style="list-style-type: none"> • Ajung; • Kaliwates; • Patrang; • Puger • Sumbersari 	<ul style="list-style-type: none"> • Ambulu; • Bangsalsari; • Wuluhan
Maju Tetapi Tertekan	Relatif Tertinggal
<ul style="list-style-type: none"> • Sumberbaru • Tanggul 	<ul style="list-style-type: none"> • Arjasa; • Balung; • Gumukmas; • Jelbuk; • Jenggawah; • Jombang; • Kalisat; • Kencong; • Ledokombo; • Mayang; • Mumbulsari; • Pakusari; • Rambipuji; • Semboro; • Silo; • Sukorambi; • Sukowono; • Sumberjambe; • Tempurejo

Sumber : Data Lampiran 2016

Berdasarkan table di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- e) Ada lima kecamatan di Kabupaten Jember yang tergolong daerah maju dan tumbuh dengan cepat yakni kecamatan Ajung dengan jumlah penduduk sebanyak 75.778 jiwa, serta jumlah produk domestik regional bruto sebesar 706.894.703 yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Kecamatan Kaliwates juga mengalami banyak kenaikan dari tahun ke tahun yang mana pada tahun 2012 jumlah penduduk mencapai 112.476 jiwa dan mengalami kenaikan pada tahun 2013 sebesar 113.736 jiwa. Hal tersebut bisa memicu naiknya produk domestik regional bruto pada tahun 2013 sebesar 1.556.306.957 (milyar rupiah). Kecamatan Patrang juga mengalami banyak kenaikan pada jumlah penduduk dan PDRB dari tahun – tahun sebelumnya. Pada tahun 2013, jumlah penduduk di kecamatan Patrang mencapai 96.201 jiwa dan jumlah PDRB untuk kecamatan Patrang pada tahun 2013 sebesar 1.063.270.882 (milyar rupiah), pada kecamatan Puger jumlah penduduk pada tahun 2013 sebesar 114.506 jiwa dan jumlah PDRB tahun 2013 sebesar 896.658.686 (ratus juta rupiah) dan pada kecamatan Summersari merupakan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk dan nilai PDRB paling tinggi dibandingkan kecamatan lainnya. Hal ini dilihat dari jumlah penduduknya pada tahun 2013 sebesar 126.279 jiwa dan jumlah PDRB pada tahun tersebut sebesar 1.539.812.218 (milyar rupiah). Dengan nilai sebanyak itu menjadikan kecamatan Summersari sebagai kecamatan yang paling tinggi posisinya dibandingkan kecamatan – kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Jember.
- f) Tiga kecamatan termasuk kategori sedang tumbuh yakni kecamatan Ambulu yang memiliki jumlah penduduk sebesar 99.740 jiwa dan jumlah PDRB sebesar 814.27.901 (ratus ribu rupiah); Kecamatan Bangsalsari jugamengalami kenaikan kenaikan dari tahun ke tahun yang dimana jumlah pendudukny pada tahun 2013 sebesar 719.487.221 (ratus ribu

rupiah) dan Kecamatan Wuluhan tidak seperti kecamatan Ambulu dan kecamatan Wuluhan, hal ini dikarenakan pada kecamatan Wuluhan mengalami penurunan jumlah penduduk pada tahun 2013. Yang awalnya pada tahun 2012 jumlah penduduk sebesar 70.475 jiwa mengalami penurunan menjadi 58.497 jiwa pada tahun 2013. Namun pada nilai PDRB tahun 2013 mengalami kenaikan dibanding tahun 2012, yang dimana pada tahun 2012 jumlah PDRB kecamatan wuluhan sebesar 728.537.850 (ratus ribu rupiah) mengalami kenaikan menjadi 774.706.232 (ratus ribu rupiah).

- g) Dua Kecamatan yang tergolong kawasan maju tetapi tertekan yakni kecamatan Sumberbaru dan kecamatan Tanggul.
- h) Mayoritas kecamatan di Kabupaten Jember tergolong relative tertinggal. Kecamatan – kecamatan yang mengalami penurunan jumlah penduduk dan jumlah PDRB adalah kecamatan Arjasa, kecamatan Balung, kecamatan Gumukmas, kecamatan Jelbuk, kecamatan Jenggawah, kecamatan Jombang, kecamatan Kalisat, kecamatan Kencong, kecamatan Ledokombo, kecamatan Mayang, kecamatan Mumbulsari, kecamatan Pakusari, kecamatan Rambipuji, kecamatan Semboro, kecamatan Silo, kecamatan Sukorambi, kecamatan Sukowono, kecamatan Sumberjambe, kecamatan Tempurejo, kecamatan Umbulsari

4.3.2 Hasil Analisis Indeks Williamson

Nilai ketimpangan PDRB per kapita antar kecamatan memberikan suatu gambaran tentang kondisi, keadaan dan perkembangan pembangunan di suatu daerah. Untuk melihat gambaran yang lebih jelasnya lagi tentang kondisi suatu daerah di Kabupaten Jember, akan dibahas pemerataan ketimpangan PRBD per kapita antar kecamatan yang dianalisis dengan menggunakan indeks ketimpangan Williamson. Dalam angka indeks Williamson semakin kecil atau mendekati nol menunjukkan bahwa ketimpangan yang semakin kecil pula, bisa dikatakan bahwa daerah tersebut mengalami pemerataan, baik dari segi ekonomi, penduduk maupun infrastrukturnya. dan bila angka indeks Williamson semakin

besar atau jauh dari angka nol maka ketimpangan semakin melebar.

Ketimpangan pendapatan secara umum dapat dilihat dari perbedaan faktor alokasi dana pembangunan, konsentrasi kegiatan ekonomi, kondisi demografis dan kebijakan pemerintah (Sjafrizal, 2012: 112). Selain itu, Estudilo 1997 (dalam Mildino, 2011) menyatakan bahwa di Filipina faktor yang menyebabkan ketidakmerataan pendapatan adalah meningkatnya jumlah anggota rumah tangga terdidik dan ketidakmerataan tingkat upah.

Table 4.3 hasil indeks Williamson Kabupaten Jember periode 2008 – 2013

Tahun	Indeks Williamson
2009	0,6935
2010	0,7037
2011	0,6600
2012	0,6765
2013	0,6821

Sumber : Hasil perhitungan Analisis Indeks Williamson tahun 2008 - 2013

Pada tabel 4.3 menunjukkan hasil Indeks Williamson di Kabupaten Jember mengalami kenaikan dan penurunan. Selama tahun 2009 – 2010 terjadi kenaikan yang sangat signifikan. Pada tahun tersebut indeks williamson menunjukkan angka 0,6935 dan mengalami kenaikan 0,7037 pada tahun 2010. Tinggi rendahnya nilai indeks williamson mengandung arti bahwa ketimpangan rata – rata PDRB perkapita antar kecamatan di Kabupaten Jember dengan kecamatan lainnya menunjukkan bahwa secara rata – rata tingkat PDRB perkapita antar kecamatan di Kabupaten Jember tidak merata.

4.2.3 Hasil Analisis Indeks Bonit

Dalam penelitian ini, ketimpangan wilayah dihitung dengan menggunakan Pendekatan PDRB Per kapita relatif yang pada penelitian terdahulu telah digunakan oleh Bonet (2006) (2008) dalam mengukur kesenjangan wilayah. dalam penghitungannya diperlukan data-data dalam lingkup wilayah yang lebih kecil yang dalam hal ini adalah data dalam lingkup kecamatan. Jika indeks Bonet semakin mendekati angka 0 maka semakin kecil ketimpangan ekonomi dan semakin mendekati angka 1 atau lebih maka semakin melebar ketimpangan

ekonomi. Untuk keperluan aksesibilitas data yang lebih mudah maka digunakanlah ukuran kesenjangan wilayah berdasarkan konsep PDRB per kapita relative. Berdasarkan data yang diambil dari lampiran perhitungan indeks ketimpangan relative Bonit dapat disajikan seperti dalam tabel berikut :

Tabel 4.4 Ketimpangan Antar Wilayah Di Kabupaten Jember

INDEKS KETIMPANGAN PENDAPATAN BONIT					
Kecamatan	2009	2010	2011	2012	2013
1 Ajung	0,32529	0,30838	0,36707	0,40501	0,48882
2 Ambulu	0,45589	0,48621	0,35522	0,22647	0,21427
3 Arjasa	0,42973	0,41604	0,55708	0,56669	0,57225
4 Balung	0,21020	0,22662	0,19759	0,21502	0,21830
5 Bangsarsari	0,09127	0,11265	0,03668	0,00523	0,01005
6 Gumuk mas	0,16464	0,14992	0,21278	0,24667	0,25638
7 Jelbuk	0,58527	0,59063	0,98418	0,98472	0,98472
8 Jenggawah	0,30266	0,30050	0,25365	0,32358	0,35834
9 Jombang	0,35358	0,35518	0,49286	0,47360	0,50542
10 Kalisat	0,09061	0,12402	0,32501	0,34003	0,35073
11 Kaliwates	1,13504	1,20827	1,14835	1,15604	1,18387
12 Kencong	0,09711	0,06514	0,16520	0,18535	0,19046
13 Ledokombo	0,08613	0,09123	0,40923	0,42848	0,43994
14 Mayang	0,49265	0,49955	0,52202	0,59115	0,59111
15 Mumbulsari	0,48429	0,48040	0,53572	0,53848	0,55069
16 Pakusari	0,39762	0,39880	0,58267	0,57520	0,59293
17 Panti	0,15387	0,16676	0,24115	0,23354	0,27150
18 Patrang	0,10561	0,04747	0,89247	0,76878	0,76398
19 Puger	0,35540	0,22454	0,26740	0,26007	0,24977
20 Rambipuji	0,07518	0,05156	0,04789	0,06226	0,08554
21 Semboro	0,18695	0,22664	0,38248	0,39174	0,38316
22 Silo	0,01589	0,01367	0,15883	0,15254	0,17083
23 Sukorambi	0,59379	0,60957	0,55552	0,55284	0,56795
24 Sukowono	0,23220	0,19439	0,32324	0,32468	0,33966
25 Sumberbaru	0,02857	0,00284	0,01340	0,05905	0,00419
26 Sumber jambe	0,38478	0,38055	0,46904	0,48515	0,50184
27 Sumpersari	1,12607	1,18012	0,93854	1,06068	1,01436
28 Tanggul	0,45757	0,45469	0,00492	0,08605	0,05147
29 Tempurejo	0,61112	0,62432	0,38717	0,38983	0,40318
30 Umbulsari	0,14316	0,17017	0,23761	0,24313	0,27505
31 Wuluhan	0,24185	0,11962	0,09370	0,75779	1,11365

Sumber : Lampiran 2016

Beberapa kesimpulan data disampaikan dari data kesenjangan antar wilayah di atas :

- d) Kecamatan Kaliwates dan Kecamatan Sumbersari merupakan wilayah yang mempunyai angka kesenjangan tinggi dan tertinggi di Kabupaten Jember.
- e) Kecamatan Silo, Rambipuji, Ledokaombo merupakan tiga kecamatan di Kabupaten Jember yang mempunyai ketmpangan pendapatan antar wilayah yang paling kecil.
- f) Secara keseluruhan terjadi peningkatan kesenjangan antar wilayah. Artinya diduga pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jember membuat kesenjangan antar wilayah semakin meningkat.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dua kesimpulan yang ada dari hasil analisis dan pembahasan adalah :

1..Berdasarkan hasil analisis matrik tipologi Klassen dapat di simpulkan sebagai berikut :

- a) Ada lima kecamatan di Kabupaten Jember yang tergolong daerah maju dan tumbuh dengan cepat yakni kecamatan Ajung, Kaliwates, Patrang, Puger dan Sumbersari
- b) Tiga kecamatan termasuk kategori sedang tumbuh yakni Ambulu; Bansalsari dan Wuluhan
- c) Dua Kecamatan yang tergolong kawasan maju tetapi tertekan yakni Sumberbaru dan Tanggul
- d) Mayoritas kecamatan di Kabupaten Jember tergolong relative tertinggal. Kecamatan yang tertinggal meliputi Kecamatan Arjasa; Kecamatan Balung; Kecamatan Gumukmas; Kecamatan Jelbuk; Kecamatan Jenggawah; Kecamatan Jombang; Kecamatan Kalisat; Kecamatan Kencong; Kecamatan Ledokombo; Kecamatan Mayang; Kecamatan Mumbulsari; Kecamatan Pakusari; Kecamatan Rambipuji; Kecamatan Semboro; Kecamatan Silo; Kecamatan Sukorambi; Kecamatan Sukowono; Kecamatan Sumberjambe; Kecamatan Tempurejo dan Kecamatan Umbulsari.

2.Berdasarkan analisis kesenjangan antar wilayah di Kabupaten Jember dapat disimpulkan :

- g) Kecamatan Kaliwates dan Sumbersari merupakan wilayah yang mempunyai angka kesenjangan tinggi dan tertinggi di Kabupaten Jember
- h) Kecamatan Silo, Rambipuji, Ledokombo merupakan tiga kecamatan di Kabupaten Jember yang mempunyai ketimpangan pendapatan antar

wilayah yang paling kecil.

- i) Secara keseluruhan terjadi peningkatan kesenjangan antar wilayah. Artinya diduga pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jember membuat kesenjangan antar wilayah semakin meningkat.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka saran yang dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik diperlukan pengembangan kelimpahan sumber daya alam agar bisa memberi kontribusi besar terhadap pendapatan daerah masing.
2. Dalam menurunkan Disparitas antar Wilayah diperlukan kebijakan Pemerintah untuk pemberlakuan Otda dengan mempertimbangkan dalam hal pendapatan daerah dan pendapatan provinsi agar daerah yang tertinggal tidak semakin tertinggal..

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Arsyad, Lincolin. 1999. *Ekonomi Pembangunan Edisi Keempat*. Yogyakarta: Badan Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Ganis Damarjati, Annisa. 2010. *Analisis Factor – Factor yang Mempengaruhi Kesenjangan Pendapatan di Provins Jawa Tengah*. Tidak Dipublikasikan. Skripsi. Semarang : program Sarjana S1
- Gujarati. 2003. *Ekonometrika Dasar*. Erlangga, Jakarta.
- Hartono, Budiantoro. 2008. *Analisis ketimpangan pembangunan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah*. Tidak Dipublikasikan. Tesis. Semarang: program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Jember University Press. 2011. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember Edisi Ketiga*. Jember: Jember University Press
- Jhingan,M.,L. 1990. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali Pers
- Kuncoro, Mudrajat. 2000. *Ekonomi Pembangunan Teori,Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN
- Maharani Fadilla, Lia. 2008. *Analisis Ketimpangan Pendapatan antar Wilayah pemekaran di Sumatera Utara*. Tidak Dipublikasikan. Skripsi. Medan : program sarjana Ekonomi S1.
- Nazir, Moh. 2009.*Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Rostow & Musgrave. 1996. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Pustaka
- Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sjafrizal. 2008. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Padang: Baduose Media, Cetakan Pertama.
- Sukirno, Sadono. 1998. *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, edisi 2,cetakan 10
- Suryana. 2000. *Ekonomika Pembangunan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tarigan, Robinson. 2007. *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Bumi

Aksara, Cetakan Keempat.

Todaro, Michael P. 1998. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Penerbit Erlangga, Edisi Keenam

Tulus T.H. Tambunan. 2003. *Perekonomian Indonesia: Beberapa Permasalahan Penting*. Jakarta:Ghalia Indonesia.

Internet :

Sutarno et at. Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan antar kecamatan di Kabupaten Banyumas 1993 – 2000
<http://journal.uii.ac.id/index.php/JEP/article/viewFile/630/560> [05 Maret 2013]

Restiatun, Identifikasi Sektor Unggulan dan Ketimpangan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
<http://jurnal.umy.ac.id/index.php/jesp/article/viewFile/1484/215> [11 Maret 2013]

KurniaSari, Puput Desi dan Sri Budhi, Made Kembar. Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan antar Kecamatan di Kabupaten Buleleng
<http://ojs.unud.ac.id/index.php/eep/article/viewFile/4762/3737> [11 Maret 2013]

Masli, Lili. Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. [05 Maret 2013]

Fajar Utama, Putra. Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Ketimpangan di Kabupaten/Kota yang tergabung dalam Kawasan KEDUNGSEPUR tahun 2004 – 2008 <http://eprints.undip.ac.id/26414/2/JURNAL.pdf> [05 Maret 2013]

www.wikipedia.org [28 Maret 2013]

www.banyuwangikab.go.id [20 Maret 2013]

